

SWISSCHAM
INDONESIA
POLICY PAPER

ADVANCING INDONESIA 4.0

Opportunities to Enhance the Indonesia-Switzerland Economic Relationships in Trade, Investment, and Development



This Policy Paper has been developed by
The Swiss-Indonesian Chamber of Commerce

KESEMPATAN UNTUK MENINGKATKAN HUBUNGAN BILATERAL DI BIDANG PERDAGANGAN DAN INVESTASI ANTARA SWISS DAN INDONESIA

Perusahaan-perusahaan Swiss juga mendorong dan memiliki kegiatan riset di seluruh dunia. Kolaborasi serta investasi di banyak negara tumbuh dengan perusahaan bioteknologi yang mengalokasikan sekitar 20% dari anggaran riset dan pengembangan untuk berbagai proyek kerja sama dengan berbagai kelompok penelitian.

Perusahaan-perusahaan Swiss berada dalam posisi yang sangat baik untuk membantu Indonesia mengembangkan sektor industri yang kokoh. Peta jalan menuju Indonesia 4.0 merupakan peluang langka di generasi ini untuk merevitalisasi sektor manufaktur dan menjadikannya sektor yang kuat.

Perusahaan-perusahaan Swiss yakin bahwa prospek ekonomi Indonesia sangat menarik. Dengan solusi bisnis yang tepat serta cara pandang yang baru, perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa mengambil langkah maju guna mewujudkan cita-cita transformasi global.



PENDAHULUAN

SwissCham Indonesia bertujuan untuk meningkatkan hubungan Swiss dan Indonesia di bidang perdagangan dan investasi, serta mempromosikan kerja sama melalui dialog. Perusahaan-perusahaan Swiss yang beroperasi di Indonesia menikmati manfaat dari hubungan baik antara pemerintah kedua negara ini. Dengan dimulainya tugas pemerintahan baru yang kembali dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dengan tekad melaksanakan reformasi dalam skala yang lebih besar, semua perusahaan Swiss di bawah naungan SwissCham Indonesia ingin menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden.

Naskah kebijakan ini menguraikan ide-ide konstruktif untuk meningkatkan investasi di antara kedua negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

VISI SwissCham Indonesia

Visi SwissCham Indonesia adalah untuk menjadi platform layanan terdepan bagi peningkatan perdagangan bilateral, investasi, dan hubungan antara Swiss dan Indonesia.

MISI SwissCham Indonesia

SwissCham Indonesia berfokus untuk mempromosikan perdagangan, investasi dan pengembangan hubungan antara komunitas bisnis Swiss dan Indonesia melalui dialog kolaboratif dan advokasi, maupun melalui acara-acara jejaring sosial dan bisnis yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan para anggotanya yang berbentuk korporasi, usaha kecil menengah (UKM) maupun individu.



SNAPSHOT SWITZERLAND - INDONESIA TRADE & INVESTMENT

The impressive "SwissEcosystem"



Approximately **150 Swiss companies and brands** are locally active and have more than **20,000 employees** on their payroll



The **Swiss-Indonesian Chamber of Commerce**, also called "**SwissCham Indonesia**", was founded 1 August 2018 and currently has nearly 70 members



A **Swiss Business Hub Indonesia** (integrated in the Embassy of Switzerland) was opened June 2017. It offers trade and investment promotion services, with a special focus on Swiss SME's



The recently opened **Swiss Centre Indonesia** is an "incubator" platform which offers one-stop solutions for Swiss SMEs intending to invest in Indonesia



The **Swiss Alumni Network** with its more than **200 members** (alumni of Swiss universities and hospitality schools) offers a variety of networks and platforms

Bilateral Trade 2018



Total bilateral trade: **USD 1'356 mio.**

Source: Swiss Federal Customs Administration

CHF 75 million
for four years

Switzerland's current Economic Cooperation and Development Programme 2017-2020 is designed to assist the Government of Indonesia (GoI) in (1) improving public service delivery, as well as (2) creating a more competitive private sector. The total budget amounts to CHF 75 million over four years.

Switzerland's Foreign Direct Investment (FDI) realization in Indonesia

In 2017 Switzerland ranked no 12 with the investment value of USD 615.5 million and 227 projects.

#12

In 2018, Switzerland ranked no. 17 with the investment value of USD 243.2 million and 225 projects.

#17

source : BKPM

By 2018 the accumulated FDI capital stock reached



source : Swiss National Bank

SWITZERLAND - INDONESIA Investment News

SwissCham Daily Newspaper

Wednesday, November 20 2019

CHF 1

EFTA States and Indonesia Sign Comprehensive Economic Partnership Agreement



The Agreement will provide access for major export products to Indonesia, from fish and marine products, agricultural and food industry products such as cheese, chocolates and coffee, to industrial and technical products, machinery and watches, chemicals and pharmaceuticals.

Givaudan Expands in Indonesia with New Development Centre

The investment will enable both the Flavours and Fragrances divisions of the Swiss-based company to serve customers across a wide range of markets: food, beverages and fine fragrances, personal care products, etc.

DKSH and Wicaksana Successfully Complete Transaction

Acquisition of 60 percent of shares in PT Wicaksana provides the basis for DKSH's market entry in Indonesia for Business Units Consumer Goods and Healthcare.



Nestlé Indonesia Invests USD 100 Million for Factory Expansion in Indonesia

PT Nestlé Indonesia today announced the expansion of its three factories in Karawang (West Java), Kejayan (East Java) and Panjang (Lampung).

Kuehne + Nagel Strengthens Footprint in Indonesia Through Strategic Acquisition

Extension of strategic partnership with Wira Logistics through acquisition of its logistics operations.

Barry Callebaut Expands in Indonesia with Second Chocolate Plant

Switzerland-based chocolate and cocoa products producer, Barry Callebaut has inaugurated its second chocolate manufacturing plant in Rancaekek, Indonesia.

Zurich to Acquire Adira Insurance, a Leading Insurer in Indonesia

The transaction will see Zurich become the largest foreign P&C insurer in Indonesia and reinforces Zurich's strategy of achieving positions of scale in target markets

Sika Boosts Production to 700,000 Tons a Year with Inauguration of 3rd Factory

The investment will support the government of Indonesia's focus on building infrastructure.

ABB opens new manufacturing facility in Indonesia

Swedish-Swiss multinational technology company ABB is expanding its operation in Indonesia by building a new high voltage gas-insulated switchgear (GIS) manufacturing facility in Tangerang, Banten.

Naskah kebijakan ini dibuat oleh SwissCham Indonesia, sebuah kamar dagang yang tidak seperti kamar dagang lainnya. Swiss adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang menekankan inovasi sebagai sumber daya saing dan kami berharap bahwa kesiapan kami untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, serta saran-saran kami dapat memaksimalkan upaya mencapai **“Advancing Indonesia 4.0”**

DAFTAR ISI

Pendahuluan	ii-iii
GAMBARAN INDUSTRI <i>Switzerland - Indonesia Trade & Investment</i>	iv-v
Kata Pengantar <i>Dr. Luthfi Mardiansyah – Ketua SwissCham Indonesia</i> <i>Y. M. Bpk. Kurt Kunz – Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN</i> <i>Y. M. Prof. Dr. Mulliaman D. Hadad – Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein</i>	2-5
Executive Summary	6-7
SEKTOR Farmasi, Kimia dan Kosmetik	8-13
Manufaktur & Permesinan	14-17
Makanan dan Minuman	18-21
Pertanian dan Perikanan	22-27
Jasa	28-33
Kemitraan dalam Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan	34-37
Keanggotaan	38-39

KATA PENGANTAR



Dr. Luthfi Mardiansyah
Ketua SwissCham Indonesia



Naskah kebijakan ini adalah kontribusi nyata dari Perkumpulan terhadap dialog antara sektor swasta Swiss dan Pemerintah RI

Indonesia dan Swiss telah menjaga hubungan ekonomi bilateral yang sangat erat sejak tahun 1952. Perusahaan-perusahaan Swiss di Indonesia sudah beroperasi selama sekitar empat dekade. Data yang ada memperlihatkan bahwa alur perdagangan dan investasi di antara kedua negara relatif masih sedikit, namun terlihat tren yang menjanjikan selama lima tahun terakhir. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia, perusahaan-perusahaan Swiss merupakan investor Eropa terbesar keempat pada tahun 2018 (USD 243,2 juta), di bawah Belanda (USD 943,12 juta), Jerman (280,42 juta) dan Inggris (271,13 juta). Investasi langsung dari Swiss mengalir mayoritas ke bidang industri kimia dan farmasi, makanan, serta penjualan dan layanan pemeliharaan. Kesuksesan perusahaan-perusahaan ini tentunya diperoleh dari teknologi dan keunggulan operasional Swiss yang terkemuka. Walaupun Swiss merupakan pasar tujuan ekspor nontradisional bagi Indonesia, sampai tahun 2018 negara kecil nan unik ini menduduki peringkat ke-13 pasar ekspor Indonesia. Swiss memandang Indonesia sebagai pasar masa depan. Saat ini ada sekitar 150 perusahaan dan merek dagang Swiss yang beroperasi di Indonesia, yang mempekerjakan puluhan ribu tenaga kerja.

Oleh sebab itu, para anggota SwissCham Indonesia ingin menyumbangkan masukan-masukan untuk memperkuat hubungan bisnis kedua negara. Pembentukan SwissCham Indonesia pada bulan Agustus 2018 menandai awal partisipasi sektor swasta Swiss dalam dialog yang membangun dengan Pemerintah Republik Indonesia. Perkumpulan ini dibentuk untuk menjadi platform bagi perusahaan-perusahaan Swiss yang telah aktif beroperasi di Indonesia untuk bekerja sama dalam membantu Pemerintah RI, dengan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan daya tarik Indonesia terhadap investasi langsung luar negeri. Para anggota ini merasa berkewajiban untuk menjadi bagian dari dialog dengan menunjukkan peluang-peluang kerja sama antara pelaku bisnis Swiss dan Pemerintah Republik Indonesia (RI).

Naskah kebijakan ini adalah kontribusi nyata dari Perkumpulan terhadap dialog antara sektor swasta Swiss dan Pemerintah RI. Sebagai kelompok pelaku bisnis dengan tradisi yang panjang dalam hal inovasi dan presisi, SwissCham Indonesia ingin membagikan keunggulan ini dengan para pemangku kepentingan di Indonesia, demi kerja sama yang semakin erat. Naskah ini siap untuk dipresentasikan kepada pemerintah yang baru, para anggota parlemen, serta semua pemangku kepentingan terkait.

Peralihan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan dialog ini. Pada periodenya yang baru, Jokowi bervisi untuk mereformasi lingkungan bisnis maupun upaya menarik investasi langsung luar negeri. Hal ini sejalan dengan visi SwissCham Indonesia. Anggota-anggota SwissCham Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai tujuh puluh (70) sangat ingin memberikan dukungan kepada pemerintah dalam merealisasikan visinya.

Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yang Mulia Bapak Kurt Kunz atas dukungan beliau kepada pembuatan naskah ini, serta kepada semua anggota SwissCham Indonesia dan tim Sekretariat yang telah berpartisipasi dalam mengembangkan dan menyelesaikan naskah kebijakan ini.

Sekali lagi kami ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo, dan mengharapakan kesuksesan baginya maupun pemerintahannya dalam memimpin negara ini menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih karena telah mengizinkan SwissCham Indonesia untuk menjadi bagian dari 'Visi Indonesia'.



Y. M. Bapak Kurt Kunz
Duta Besar Swiss untuk Indonesia,
Timor Leste, dan ASEAN



Prospek untuk semakin meningkatkan perdagangan dan investasi di antara Swiss dan Indonesia cukup menjanjikan

Pada tahun 2019, Indonesia berhasil menyelenggarakan salah satu proses pemilihan umum demokratis yang paling kompleks. Presiden Joko Widodo kembali terpilih untuk menjabat pada periode kedua dan para anggota Parlemen yang baru juga telah dipilih.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan elemen-elemen utama Visi Indonesia yang ingin dicapainya dalam lima tahun ke depan. Di samping meningkatkan apa yang telah dicapai di masa lalu, beliau juga telah menetapkan prioritas dan penekanan baru. Beberapa elemen ini memerlukan partisipasi yang kuat dan menentukan dari perusahaan-perusahaan dan investor swasta.

Swiss-Indonesian Chamber of Commerce (SwissCham Indonesia) yang dibentuk pada tahun 2018, memiliki hampir 70 anggota dan berjalan dengan baik. SwissCham Indonesia mengupayakan akses yang lebih luas terhadap Pemerintah RI bagi para anggotanya dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan bisnis dan investasi yang lebih baik dan lebih kondusif di Indonesia melalui advokasi dan kerja sama.

Dengan mulainya Pemerintah dan Parlemen baru RI menjalankan tugas mereka, kini adalah momentum yang tepat untuk bekerja sama. SwissCham Indonesia—melalui sektor-sektornya dan dengan mendengarkan masukan-masukan dari para anggotanya—telah menyusun serangkaian pertimbangan dan usulan yang analitis.

Naskah kebijakan ini menguraikan pertimbangan-pertimbangan SwissCham Indonesia untuk perwakilan Pemerintah RI, anggota-anggota Parlemen maupun pemangku kepentingan lainnya. SwissCham Indonesia berkomitmen terhadap pendekatan yang membangun: perkembangan yang berkelanjutan dan inklusif hanya dapat dicapai dengan upaya yang menyatukan Pemerintah RI dan pihak swasta.

Prospek untuk semakin meningkatkan perdagangan dan investasi di antara Swiss dan Indonesia cukup menjanjikan. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara European Free Trade Association (EFTA) dan Indonesia telah ditandatangani pada bulan Desember 2018 dan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2020. Perjanjian bilateral untuk mempromosikan dan melindungi investasi, serta pengembangan perjanjian untuk menghindari pajak berganda sedang dibuat.

Sejak tahun 1970-an, Swiss telah mengimplementasikan proyek-proyek pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia. Banyak dari proyek ini yang menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Pengembangan sumber daya manusia selalu merupakan elemen utama kerja sama pengembangan ekonomi Swiss di Indonesia. Saya yakin bahwa perusahaan-perusahaan Swiss memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya mengembangkan tenaga kerja dan pendidikan kejuruan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada SwissCham Indonesia atas upayanya yang sangat baik untuk menjadi platform jejaring yang inovatif. Semoga SwissCham Indonesia dan naskah kebijakan ini sukses dalam membuka pintu-pintu diskusi. Visi Indonesia dari Presiden Joko Widodo menunjukkan optimisme yang tinggi dan komunitas korporasi Swiss siap untuk memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.



Y. M. Prof. Dr. Muliaman D. Hadad
Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan
Liechtenstein



Peluang yang sangat besar untuk meningkatkan dan memperluas hubungan ekonomi yang sudah dibina dengan sangat baik di antara kedua negara

Swiss adalah salah satu ekonomi dunia yang paling kompetitif. Swiss juga merupakan pasar ekspor nontradisional bagi Indonesia. Negara ini memiliki produk domestik bruto (PDB) per kapita tertinggi kedua di dunia (CHF 77.943 atau sekitar EUR 73.000 atau USD 81.000 pada tahun 2015). Sekitar 74% dari PDB Swiss dihasilkan dari sektor jasa dan 25% dari industri.

Di belahan dunia lainnya, Indonesia, dengan populasi melebihi 260 juta orang, mewakili pasar yang besar di wilayah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), dan memiliki potensi untuk menjadi salah satu dari sepuluh besar ekonomi dunia sampai tahun 2030, menurut berbagai sumber. Sebagai salah satu anggota G20 yang merupakan kelompok ekonomi terdepan, Indonesia juga berdiri di antara negara-negara paling “terkoneksi” di dunia, dengan 1.324 sambungan selular yang terdaftar dari 1.000 penduduk (2015). Hal ini menunjukkan potensi yang besar, jika Pemerintah RI dapat memaksimalkan keuntungan demografis Indonesia, untuk memicunya menjadi negara maju pada tahun 2045, tahun yang sama ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya.

Dalam tahun-tahun terakhir, nilai ekspor Indonesia dan nilai investasi Swiss di Indonesia meningkat secara signifikan. Transaksi perdagangan bilateral Indonesia-Swiss menghasilkan surplus untuk Indonesia. Dari tahun 2015 sampai 2018, nilai investasi Swiss di Indonesia mencapai USD 1.26 miliar. Pada tahun 2018, nilai investasi Swiss di Indonesia mencapai USD 243 juta yang tersebar di 225 proyek. Pencapaian ini menempatkan Swiss sebagai negara investor terbesar ketiga di Indonesia dari Eropa. Saat ini terdapat sekitar 150 perusahaan Swiss yang aktif beroperasi di Indonesia, dengan menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja lokal.

Pada tahun 2018, Indonesia dan Swiss merampungkan dan menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) (IE-CEPA). Perjanjian ini disusun dari negosiasi bertahun-tahun yang akhirnya membuahkan hasil bagi kepentingan nasional kedua negara. Perjanjian IE-CEPA merupakan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan dan memperluas hubungan ekonomi yang sudah dibina dengan sangat baik di antara kedua negara.

Diharapkan bahwa produk-produk Indonesia seperti minyak kelapa sawit, ikan, emas, kopi, alas kaki, mainan, tekstil, dan peralatan listrik akan mendapatkan peluang yang lebih baik untuk bersaing di pasar EFTA. Untuk Indonesia, negara-negara anggota EFTA terutama Swiss, memiliki potensi yang baik untuk menjadi sumber investasi utama, terutama dalam hal teknologi maju dan produk layanan kesehatan, selain perbankan dan telekomunikasi.

Oleh sebab itu, saya senang menjadi bagian dari naskah kebijakan berjudul “Advancing Indonesia 4.0” ini, yang disusun oleh SwissCham Indonesia. Hal ini merupakan peluang yang sangat baik untuk menggali dan menelusuri potensi ekonomi yang sangat besar di antara kedua negara secara lebih mendalam, baik untuk perusahaan Indonesia maupun Swiss.

Pemenuhan potensi ini merupakan kepentingan nasional kedua negara. Tentunya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern siap untuk memberikan dukungan dan melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan ini.

Executive Summary

Indonesia adalah negara yang sangat dinamis, memiliki pengaruh regional yang besar dan berperan di tingkat dunia sehingga memberikan banyak peluang bagi Swiss untuk menjalin kerja sama.

Swiss secara resmi telah memiliki perwakilan di Indonesia sejak 1952 dan kedua negara telah memiliki hubungan bilateral yang baik sejak saat itu. Indonesia merupakan negara prioritas bagi Swiss. Saat ini Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi Swiss terpenting bagi penanaman modal langsung di Asia, dan Swiss merupakan salah satu tujuan investasi Indonesia terbesar di Eropa.

Presiden Joko Widodo setelah terpilih menjanjikan bahwa pemerintahan barunya tidak akan berhenti mendorong reformasi untuk mencapai target yang ambisius, menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia terbesar, dengan pencapaian GDP USD 7.3 triliun di tahun 2045, yang merupakan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Pentingnya pendidikan, teknologi, dan penemuan sangat menempel dengan Swiss, dan bukan rahasia lagi bahwa transfer pengetahuan sudah menjadi 'DNA' dari banyak perusahaan Swiss yang beroperasi di berbagai sektor di Indonesia, di mana pengalaman dan keahlian Swiss sudah dikenal secara internasional. Selain itu, di industri manufaktur, jasa dan pertanian, perusahaan Swiss juga terlibat dalam pendidikan kejuruan dan pelatihan dasar, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, serta perkembangan sektor swasta lokal. Hal ini menempatkan Swiss di posisi yang strategis untuk mendukung Indonesia dalam perjalanannya menuju industrialisasi dan digitalisasi, serta meningkatkan perkembangan ekonomi dalam era keemasan ini.

Perusahaan-perusahaan Swiss telah menunjukkan pilihan pada strategi investasi jangka panjang yang mencakup pengembangan bisnis lokal yang kuat serta keterlibatan sosial di Indonesia. Bagian tak terpisahkan dari strategi jangka panjang ini adalah transfer pengetahuan dan keahlian, sebuah pendekatan yang akan meningkatkan manfaat bagi Indonesia dalam jangka panjang. Perusahaan-perusahaan Swiss memahami pentingnya manfaat timbal balik ini. Mereka juga memiliki ketertarikan untuk mempekerjakan atau mengembangkan keahlian tenaga nasional semaksimal mungkin.

Di tengah upaya keras dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia melalui berbagai kebijakan reformis, SwissCham Indonesia bekerja sama untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kemitraan antara komunitas Swiss dan Indonesia dalam skala yang lebih luas.

Berangkat dari pengalaman pemangku kepentingan di sektor swasta di Indonesia dan di dunia, SwissCham Indonesia berikut ini menyertakan beberapa masukan konstruktif terkait langkah-langkah yang dapat diambil oleh

Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi di sektor-sektor yang menjadi prioritas.

- + **Kerangka kebijakan (*policy framework*)** yang berbasis prinsip kepastian hukum, transparansi, non-diskriminasi serta perlindungan hak intelektual akan membantu Pemerintah merancang dan mengimplementasikan reformasi kebijakan yang menciptakan ekosistem yang atraktif, kuat, dan kompetitif, baik untuk investasi domestik maupun asing.
- + **Peta jalan industri (*industry roadmap*)** yang jelas untuk mendukung iklim investasi dan pertumbuhan di berbagai sektor industri, yang dikomunikasikan kepada komunitas bisnis sehingga memberikan kepastian bagi investor untuk menyusun rencana dan strategi investasi jangka panjang di Indonesia.
- + **Meningkatkan daya saing** dengan lebih membuka diri terhadap investasi asing langsung (*foreign direct investment/FDI*). Swisscham Indonesia memandang pentingnya meninjau ulang Daftar Negatif Investasi (DNI) dan kebijakan kontra-produktif yang tidak memberikan rasa keadilan antara pelaku bisnis lokal dan asing, serta melemahkan daya saing untuk menarik investasi asing.
- + **Percepatan dan perbaikan proses dan prosedur** melalui penyederhanaan, pengurangan, konsolidasi serta peningkatan digitalisasi sehingga menjadi lebih profesional, transparan dan efektif. SwissCham Indonesia berkomitmen untuk bekerja bersama Pemerintah dalam mengidentifikasi kondisi yang memungkinkan untuk mendorong investasi serta adopsi penggunaan teknologi digital.
- + **Dialog berkelanjutan yang konstruktif dan kolaboratif** antara Pemerintah dengan pelaku bisnis untuk mempertemukan dan menjembatani kebutuhan para pemangku kepentingan dalam kerangka kemitraan. Swisscham Indonesia berkomitmen menjadi mitra dalam dialog yang transparan dan konstruktif dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia.

Sangat diharapkan bahwa masukan-masukan yang konstruktif dalam usulan kebijakan ini dapat merangsang dialog yang akan mendukung perluasan kemitraan ekonomi antara Swiss dan Indonesia, membawa keuntungan bersama dan mempercepat masuknya Indonesia ke dalam periode emas.



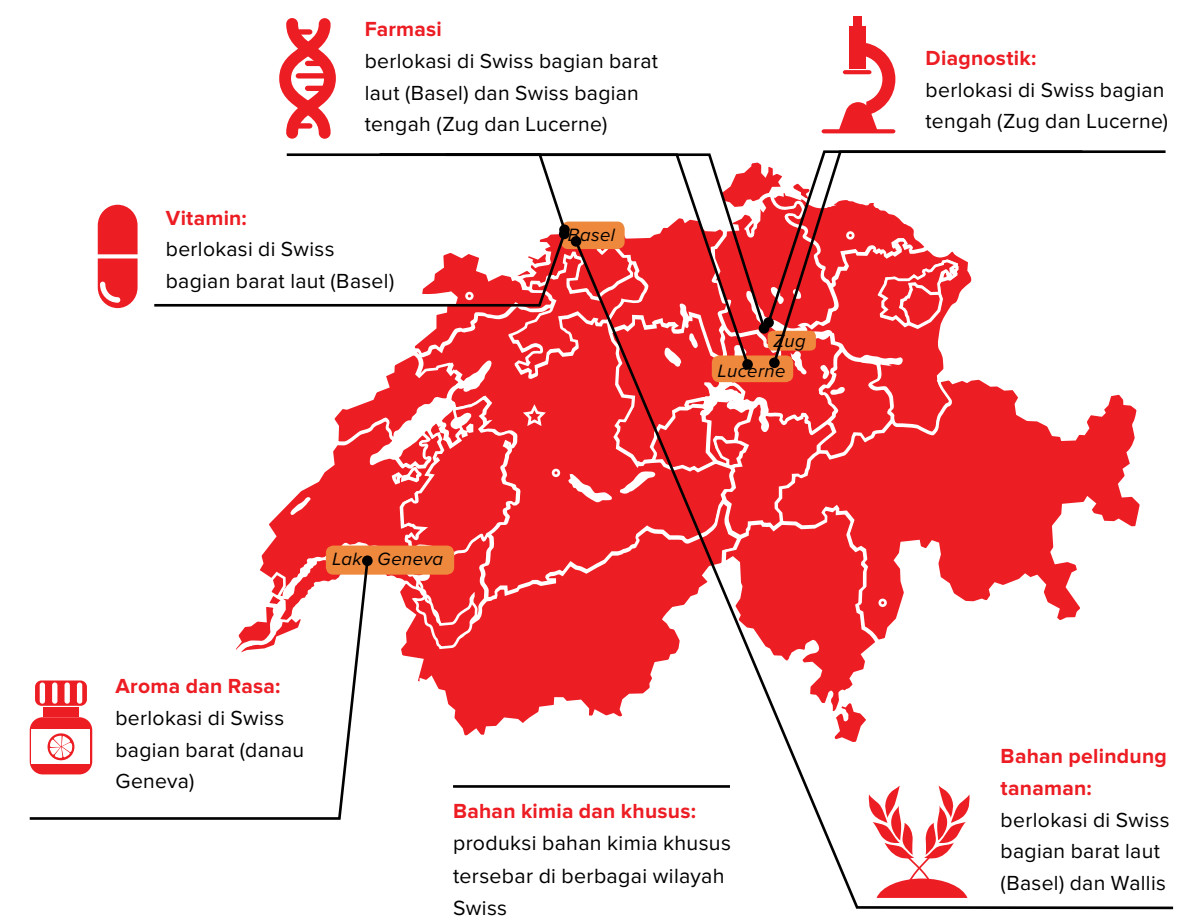
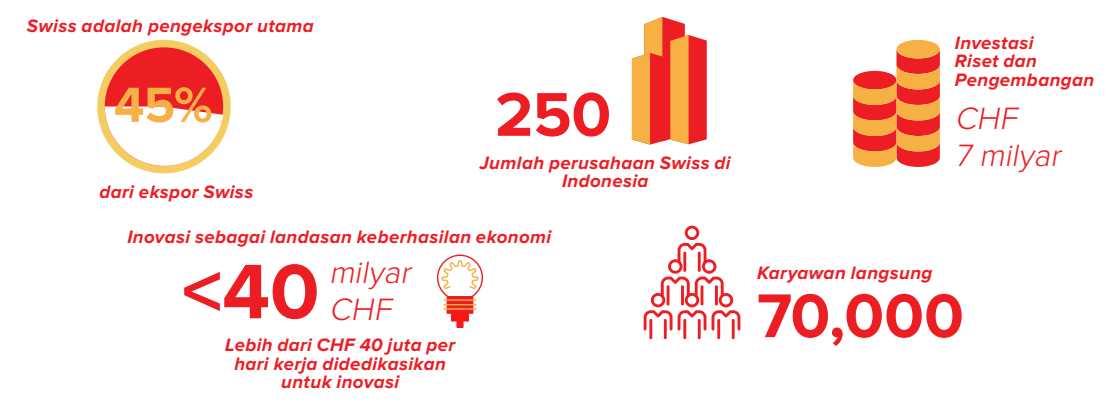
FARMASI, KIMIA, DAN KOSMETIK
GAMBARAN INDUSTRI



FARMASI, KIMIA DAN KOSMETIK

Industri kimia, farmasi dan kosmetik dicirikan dengan pengelompokan secara regional:

- + **Farmasi:** berlokasi di Swiss bagian barat laut (Basel) dan Swiss bagian tengah (Zug dan Lucerne), memproduksi bahan baku, obat-obat resep dan obat-obat bebas baik paten maupun generik.
- + **Diagnostik:** berlokasi di Swiss bagian tengah (Zug dan Lucerne), menghasilkan produk-produk diagnostik untuk membantu dokter mendiagnosa penyakit.
- + **Vitamin:** berlokasi di Swiss bagian barat laut (Basel), menghasilkan bahan baku yang dipergunakan dalam produksi farmasi, makanan dan pakan ternak.
- + **Aroma dan Rasa:** berlokasi di Swiss bagian barat (Danau Geneva), menghasilkan bahan-bahan untuk memproduksi makanan, kosmetik dan parfum.
- + **Bahan pelindung tanaman:** berlokasi di Swiss bagian barat laut (Basel) dan Wallis, memproduksi herbisida, fungisida, insektisida termasuk bahan aktif yang terutama dipergunakan di bidang pertanian.
- + **Bahan kimia dan khusus:** menghasilkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan memerlukan riset dan pengembangan yang intensif, produksi bahan kimia khusus tersebar di berbagai wilayah Swiss. Permintaan tahunan untuk bahan-bahan khusus ini adakalanya hanya perlu beberapa metrik ton, dan semua perusahaan terkait sangat berorientasi ekspor.



KEBIJAKAN YANG BUTUH KEJELASAN DAN SOLUSI YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN

KEHARUSAN MELOKALISASI:

1. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Instruksi Presiden No. 6/2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan ditandatangani pada tanggal 8 Juni 2016 oleh Presiden Joko Widodo dengan tujuan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia. SwissCham Indonesia menghargai latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut, namun menekankan bahwa dampak TKDN bagi industri farmasi dan ekonomi melampaui risiko adanya hambatan bagi ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Bagi perusahaan asing yang ingin masuk ke Indonesia, dampak TKDN berkaitan dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi di lingkup regulasi. Akibat ketidakpastian penerjemahan aturan TKDN, perusahaan-perusahaan asing harus menginvestasikan sumber daya yang cukup besar untuk dapat beradaptasi dengan aturan TKDN, mengumpulkan informasi tentang bagaimana mereka dapat berkembang, serta bagaimana aturan pelaksanaan TKDN secara spesifik akan berdampak terhadap operasi bisnis mereka. TKDN juga memiliki dampak lanjutan yang kurang menguntungkan bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Untuk dapat mengikuti ketentuan TKDN, sebagian besar perusahaan menerapkan strategi untuk mengandalkan pemasok layanan lokal. Hal ini mengakibatkan adanya penyimpangan yang cukup besar antara produksi dan layanan, yang secara artifisial diciptakan oleh TKDN. Lebih jauh lagi, perusahaan-perusahaan multinasional biasanya menaruh investasi besar pada riset dan pengembangan untuk meningkatkan produk-produk mereka. Meski demikian, komponen-komponen modern tertentu yang merupakan hasil manfaat investasi riset dan pengembangan tidak dapat masuk ke pasar Indonesia karena TKDN mewajibkan produk-produk itu terbuat dari bahan-bahan yang diproduksi secara local. Dengan sendirinya, Indonesia membentengi diri dari investasi riset dan pengembangan internasional yang dilakukan oleh mitra dagang asing. Secara lebih spesifik, hal ini akan mendorong penurunan daya saing jangka panjang dari industri lokal.



Perusahaan multinasional yang berinvestasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan tidak diikutsertakan dalam pasar Indonesia karena TKDN mensyaratkan dipergunakannya barang-barang produksi lokal

2. Peraturan Menteri Kesehatan

No.1010/MENKES/PER/XI/2008

(Permenkes 1010)

Permenkes 1010 yang berlaku sejak November 2010, mencegah perusahaan farmasi multinasional berbasis riset untuk mendapatkan izin pemasaran atas produk-produk mereka. Dalam ketentuan Permenkes 1010, hanya perusahaan yang terdaftar sebagai 'industri farmasi lokal' dapat menerima izin pemasaran. Sementara, produk-produk perusahaan multinasional berbasis riset dan perusahaan asing lainnya—termasuk yang tidak memproduksi produk-produknya di Indonesia dan diklasifikasikan sebagai distributor farmasi atau "Pedagang Besar Farmasi/PBF"—tidak dapat dipasarkan kecuali jika perusahaan tersebut mendirikan fasilitas produksi lokal; atau mentransfer data properti intelektual yang sensitif ke perusahaan lain yang memiliki fasilitas produksi lokal di Indonesia. Aspek lain dari Permenkes 1010 adalah kewajiban memproduksi produk-produk impor secara local dalam waktu lima tahun setelah import (dengan beberapa pengecualian, contoh; produk-produk di bawah perlindungan paten).

SwissCham Indonesia menyarankan tinjauan kembali atas Permenkes 1010 agar peraturan tersebut mencapai tujuannya dalam melindungi pasien. Interpretasi Permenkes 1010 dilihat cukup berdampak pada berkurangnya investasi asing langsung, pada ketergantungan terhadap produsen lokal untuk mengimpor bahan aktif farmasi (90%), dan pada keterbatasan untuk meluncurkan obat-obatan baru yang inovatif untuk perawatan pasien, serta rendahnya tingkat riset klinis. Hal-hal tersebut sangat disayangkan mengingat Indonesia menunjukkan pertumbuhan pasar yang kuat, dan memiliki pangsa dan potensi pasar yang cukup besar.

SOLUSI KEBIJAKAN PENDUKUNG

PERTUMBUHAN

- + SwissCham Indonesia percaya bahwa implementasi Permenkes 1010 dan TKDN in sector farmasi membatasi masuknya para eksportir ke pasar Indonesia. Permenkes 1010 membutuhkan perhatian besar, baik dalam hal analisis ekonomi bidang perdagangan, maupun dalam penerapan kebijakan dagang.
- + Untuk mencegah pembatasan impor atas obat-obatan inovatif, SwissCham Indonesia menyarankan semua pihak bekerja bersama dengan melibatkan institusi-institusi terkait, sehingga tercapai solusi yang memungkinkan semua produk farmasi berkualitas tinggi diperdagangkan, dijual, dan didistribusikan di Indonesia, tanpa memandang asal produk itu.
- + SwissCham Indonesia dengan hormat mengimbau pengecualian sektor farmasi dan bioteknologi dari TKDN dan Permenkes 1010, dan mengimbau agar sebaiknya diterapkan rangkaian kebijakan dan faktor-faktor yang mendukung, dengan fokus jangka panjang yang kuat atas insentif positif.

SwissCham Indonesia dengan hormat meminta revisi Permenkes 1010, dan penerapan kembali prosedur persetujuan yang sebelumnya, yang mengizinkan perusahaan-perusahaan tanpa fasilitas produksi di Indonesia untuk mendaftarkan produk-produk mereka, sampai dikeluarkan kebijakan lainnya yang lebih tepat.



UNDANG-UNDANG PATEN

Pada 28 Desember 2018, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan No.39 tahun 2018 terkait Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Paten No.13/2016.

Keluarnya peraturan tersebut sangat mengejutkan bagi perusahaan-perusahaan Swiss, terutama karena tidak adanya konsultasi dengan pihak swasta saat proses penyusunannya. Dasar pengeluan peraturan wajib paten di Indonesia ini perlu diperjelas, karena peraturan ini memasukkan kriteria yang sama sekali tidak terkait pada situasi kesehatan darurat apa pun.

SOLUSI KEBIJAKAN PENDUKUNG PERTUMBUHAN

- + SwissCham Indonesia merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk mengklarifikasi UU ini, dan memperjelas bahwa kewajiban perolehan izin harus diterapkan per kasus, dengan pertimbangan penuh terhadap kondisi khusus setiap kasus. UU Paten harus sejalan dengan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), dan hanya dijalankan pada kondisi khusus sebagai pilihan terakhir, bukan sebagai praktik standar pemerintah.
- + Secara umum, SwissCham Indonesia kembali menekankan bahwa harus ada langkah yang lebih berkesinambungan dan efektif daripada UU Paten dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Langkah sukarela yang dilakukan secara independen oleh perusahaan-perusahaan berbasis riset memastikan bahwa semua pasien memiliki akses terhadap obat-obatan terbaik yang tersedia.

UNDANG-UNDANG HALAL

Undang-Undang Halal No.33/2014 ditetapkan pada September 2014, mewajibkan sertifikasi dan pelabelan halal untuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi serta produk rekayasa genetika. Peraturan perundangan tersebut menetapkan adanya lembaga sertifikasi halal yang baru, dan mensyaratkan perusahaan agar merekrut spesialis halal serta membuka formula produk yang sensitif kepada lembaga sertifikasi halal yang baru tersebut.

SwissCham Indonesia memahami dan mendukung adanya sensitivitas religius dan budaya semua masyarakat Indonesia, namun mempertimbangkan kemungkinan UU ini mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan pada kesehatan pasien. Secara spesifik, beberapa pertanyaan penting muncul terkait proses perolehan sertifikat halal, dan apakah peraturan baru ini akan berdampak negative pada akses pasien terhadap obat-obatan yang mereka butuhkan.

Mengelompokkan produk farmasi tertentu sebagai tidak halal tidaklah mendukung tujuan upaya kesehatan masyarakat dan akan merugikan akses pasien terhadap perawatan kesehatan yang optimal serta pencegahan penyakit.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, keamanan produk farmasi merupakan masalah utama yang harus dijamin oleh Pemerintah. SwissCham Indonesia yakin bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagai lembaga utama dan penegak upaya perlindungan pasien di Indonesia terkait dengan obat-obatan, merupakan pihak yang kompeten dan memadai untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kemanjuran produk farmasi yang dipasarkan di Indonesia.

Kewajiban memperoleh sertifikasi halal juga memperlambat waktu bagi pasien untuk mendapatkan obatnya. Untuk mencegah kondisi pasien memburuk, obat-obatan yang wajib dikonsumsi harus diberikan tepat waktu.

Dampak terhadap industri akan signifikan dalam hal biaya tambahan terkait kewajiban untuk memisahkan tempat meletakkan produk dan peralatan yang digunakan untuk memproses produk-produk farmasi halal dan yang dipakai untuk memproses produk-produk tidak halal.

SOLUSI KEBIJAKAN PENDUKUNG PERTUMBUHAN

- + Memahami bahwa proses inovasi dalam industri farmasi dan bioteknologi fokus pada upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, SwissCham Indonesia dengan sangat menyarankan agar Pemerintah Indonesia mempertahankan prinsip yang saat ini ada bahwa sertifikasi halal bersifat sukarela yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai alat pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Pilihan lainnya, menyarankan agar Pemerintah mempertimbangkan untuk mengecualikan produk industri farmasi dari UU Halal serta berbagai aturan pelaksanaannya.
- + Industri farmasi telah sedemikian ketat diatur dalam hal keamanan dan kemanjuran. Memaksakan pelabelan tidak halal bagi produk-produk tertentu merupakan langkah yang tidak perlu dilakukan dan dapat menunda akses pasien terhadap obat-obat yang penting.



MANUFAKTUR & PERMESINAN

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG DITAMPILKAN

Perusahaan-perusahaan Swiss dan Indonesia di sektor manufaktur dan permesinan memberikan dukungan bagi para anggotanya dengan bekerja sama untuk kepentingan bersama yang terkait dengan kegiatan bisnis dan keberadaan di Indonesia yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di sektor manufaktur dan permesinan untuk pasar Indonesia dan atau Swiss. Mereka membawa pengetahuan dan teknologi ke pasar Indonesia di bidang alat konstruksi dan teknologi, suku cadang presisi, proses otomasi, robotik dan pergerakan, pembuat mesin dan peralatan, ketenagalistrikan dan energi.

TINJAUAN & PELUANG INDUSTRI

Sebagai populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia siap untuk menjadi pusat industri di wilayah ini. Saat ini sektor industri merupakan kontributor utama bagi PDB Indonesia setiap tahunnya, dengan skala pertumbuhan yang tinggi pada investasi di bidang permesinan dan peralatan.

Pertumbuhan tahun 2020 diperkirakan akan tetap tinggi. Indikator-indikator domestik secara umum cukup menjanjikan, didukung or kepercayaan konsumen yang sangat baik. Kelas menengah Indonesia yang sedang bertumbuh, penekanan pada industrialisasi dan jasa, serta upaya Pemerintah RI dalam memperbaiki infrastruktur, merupakan landasan utama untuk keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia sedang berupaya untuk menarik berbagai pendanaan dari dalam maupun luar negeri, dan semakin membuka ekonomi serta memberikan insentif bagi investasi di sektor-sektor baru. Di sisi lain, pemerintah baru saja mengumumkan berbagai insentif pajak untuk mendukung sektor properti dan

perusahaan-perusahaan yang berinvestasi pada pelatihan karyawan, juga riset & pengembangan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan ekonomi. Meski begitu, penurunan impor sebagai akibat dari langkah-langkah pemerintah untuk menekan defisit saat ini mungkin berakibat kurang menguntungkan bagi perekonomian.

IDE UNTUK Mendukung

TERWUJUDNYA 'MAKING INDONESIA

4.0: KEMUDAHAN BERBISNIS –

KEBIJAKAN SAMPAI IMPLEMENTASI

Biro Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa industri manufaktur Indonesia saat ini semakin produktif dan kompetitif, setelah melalui beberapa kuartal yang mencatat tingkat pertumbuhan yang melemah, dengan kinerja kuartal pertama 2019 naik menjadi 4.45% dibandingkan 4.07% pada periode yang sama tahun lalu. Walaupun peningkatan ini terlihat signifikan dengan adanya inisiatif pemerintah yang dinamakan *The Making Indonesia 4.0*—suatu peta arahan terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industri 4.0—sektor industri pada umumnya masih menghadapi masalah lama yang belum dapat dituntaskan dan terus menjadi penghalang bagi pengembangan ekonomi produktif. Ketergantungan historis terhadap sumber daya alam menyebabkan industri Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga (Thailand, Malaysia, dan Vietnam) dalam hal kemudahan berbisnis.

Perusahaan-perusahaan Swiss yang inovatif berada di posisi yang baik untuk memegang peran penting sebagai mitra industri Indonesia dalam memasuki era 4.0. Dengan landasan yang kuat untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan kejuruan dan pelatihan, teknologi dan inovasi dan paparan globalnya, tidak mengherankan bahwa perusahaan-perusahaan Swiss telah berhasil mengkombinasikan manufaktur, permesinan, pembangunan lestari, dan inovasi demi menciptakan keunggulan bersaing

bagi UKM maupun perusahaan industri yang berskala lebih besar.

USULAN PRO PERTUMBUHAN

Menciptakan Kerangka Kebijakan yang Kuat dan Jelas

Kerangka kebijakan yang didasarkan pada prinsip kepastian hukum, transparansi, non-diskriminasi dan perlindungan kekayaan intelektual akan membantu pemerintah dalam merancang dan menerapkan reformasi kebijakan demi terciptanya lingkungan yang sangat atraktif, kuat, dan bersaing bagi investasi domestik maupun asing. Kerangka kebijakan ini sebaiknya meliputi bidang-bidang yang berpengaruh terhadap investasi seperti kebijakan investasi, promosi dan fasilitasi investasi, persaingan yang adil, perdagangan, perpajakan, keuangan, infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan hal-hal lainnya yang lebih luas, yang membentuk lingkungan investasi yang sehat. Anggota-anggota SwissCham Indonesia dapat menawarkan pembelajaran sejawat, yang memungkinkan pemerintah untuk menerapkan masukan-masukan dari pengalaman nyata perusahaan-perusahaan dalam menyusun kebijakan-kebijakan baru.

Memfasilitasi penyederhanaan dan digitalisasi prosedur

Saat ini pemerintah sedang melakukan reformasi besar-besaran yang akan memperbaiki lingkungan bisnis di Indonesia secara signifikan. Penerapan portal pelayanan terpadu satu pintu (OSS) mendapat sambutan baik walaupun masih dapat diperbaiki lagi. Para anggota SwissCham Indonesia mengharapkan adanya pengurangan, penyederhanaan, konsolidasi, dan digitalisasi prosedur lebih lanjut agar semakin cepat dan responsif. Penerapan pendukung teknologi informasi yang lebih luas, serta insentif, dan memudahkan perbaikan prosedur, meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan efektivitas biaya.



Dalam kerangka kerja 'Making Indonesia 4.0', Indonesia sedang merevitalisasi sektor manufakturnya dengan memperkenalkan konsep Industri 4.0

Keterbukaan terhadap Investasi Langsung Luar Negeri

Upaya pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan melalui pengenduran Daftar Negatif Investasi (DNI) atau perjanjian perdagangan (misalnya ID-EFTA CEPA) diterima dengan baik oleh banyak pihak. Dengan disetujuinya DNI baru-baru ini, kini banyak bisnis yang dapat dimiliki oleh pihak asing secara penuh atau sebagian. Meski demikian, beberapa bidang bisnis juga menghadapi beberapa keterbatasan baru. Tingkat keterbukaan yang ada sekarang dianggap kurang memadai mengingat sebab akibat keterbukaan dagang terhadap arus investasi asing langsung telah teruji. Proses kajian terhadap DNI dapat diperbaiki melalui peningkatan konsultasi, transparansi, dan hubungan terhadap kerangka kebijakan industri saat ini. Para anggota SwissCham mengimbau pemerintah untuk semakin membuka DNI dan berharap dapat menjadi mitra aktif dalam proses kajian tersebut. Mereka juga ingin membantu pemerintah meningkatkan daya saing negara melalui pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia untuk mencapai produktivitas aset manusia yang lebih tinggi.

Memenuhi Potensi Ekonomi Digital

Dalam kerangka kerja 'Making Indonesia 4.0', Indonesia sedang merevitalisasi sektor manufakturnya dengan memperkenalkan konsep Industri 4.0. Dengan rencana untuk menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara mitra resmi Hannover Fair 2020; salah satu pameran teknologi industri dunia. Pemanfaatan Industrial Internet of Things (IIOT) yang lebih besar lagi tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, aksi pemerintah dan pelaku bisnis dibutuhkan untuk memenuhi potensi ini. Berbagai negara telah gagal memanfaatkan peluang ini akibat tidak memadainya kondisi pendukung adopsi IIOT yang cepat, seperti infrastruktur, keahlian, dan sistem regulasi. Swiss bersama Amerika Serikat, negara-negara Nordik, dan Belanda sudah berada di posisi teratas dalam hal adopsi IIOT. Para anggota SwissCham dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu mengidentifikasi perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk mendorong peningkatan investasi dalam IIOT dan meningkatkan skala adopsinya.

Prediktabilitas dan Penerapan yang Konsisten atas Regulasi Pajak

Dalam memutuskan investasi baru, prediktabilitas regulasi pajak dan penerapannya yang konsisten merupakan hal penting bagi investor. Upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk reformasi yang lebih baik melalui penyederhanaan, transparansi, dan prediktabilitas dalam interpretasi regulasi pajak disambut baik

dan dipandang sebagai upaya melawan ekonomi bawah tanah. Para anggota SwissCham mendukung transformasi Dirjen Pajak lebih lanjut dalam upayanya menyelaraskan penerapan regulasi pajak, dan memastikan pelaksanaan yang konsisten di tingkat operasional di berbagai sektor industri.

Menarik Tenaga Kerja Asing ke Indonesia

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 20/2018 mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Peraturan baru ini menyederhanakan proses permohonan izin pekerja asing sehingga lebih cepat dan efisien. Salah satu perubahan pentingnya adalah penghapusan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk kasus-kasus tertentu. Para anggota SwissCham Indonesia optimistis bahwa proses permohonan izin pekerja asing yang lebih efisien dan sederhana akan meningkatkan investasi langsung luar negeri di Indonesia, sehingga mempercepat transfer pengetahuan yang kemudian membuka peluang kerja lokal yang lebih luas. Walaupun upaya pemerintah untuk memperkenalkan proses perizinan dan protokol aplikasi penempatan tenaga kerja asing yang lebih mudah, para anggota SwissCham Indonesia ingin mendukung dan mengimbau pemerintah untuk melangkah lebih jauh lagi, bukan hanya dalam hal perampingan proses administrasi, tapi juga dalam persaingan untuk menarik tenaga kerja asing dengan kompetensi tinggi, sejalan dengan kerangka kerja 'Making Indonesia 4.0'.

Penerapan Kandungan Lokal untuk Mendorong Pertumbuhan yang Inklusif

Pemerintah melalui Menteri Perindustrian telah menetapkan persyaratan kandungan lokal bagi industri-industri tertentu. Undang-undang kandungan lokal juga mengimbau lembaga-lembaga pemerintah dan badan-badan usaha milik negara (BUMN) untuk menggunakan produk domestik, dengan kelonggaran jika barang-barang yang diproduksi di dalam negeri tidak memenuhi standar kuantitas dan

kualitas. Walaupun pemerintah jelas bermaksud baik dalam hal ini, menerapkan kebijakan untuk bekerja sama dengan perusahaan lokal atau membeli dari dalam negeri bukanlah solusi tepat sasaran. Dalam praktiknya, implementasi langkah tersebut menimbulkan implikasi yang tidak konsisten, menimbulkan beberapa tantangan, antara lain menentukan bagaimana kebijakan tersebut berfungsi di konteks pasar tertentu, yang kemudian menimbulkan beberapa implikasi kemunduran atau kontraproduktif terkait penarikan investasi asing langsung. Para anggota SwissCham Indonesia mengimbau Pemerintah RI untuk melakukan dialog erat dan berkelanjutan untuk memastikan pertumbuhan inklusif yang diharapkan dapat tercapai, di saat yang sama menyediakan lingkungan bisnis yang adil untuk semua investor.

Disiplin Implementasi

Upaya pemerintah untuk menerapkan reformasi lebih lanjut perlu didukung dengan program implementasi yang kuat dan konsisten. Memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan di tahap awal merupakan hal utama untuk mencapai tujuan yg diharapkan. Penerjemahan tujuan kebijakan ke dalam aturan dan panduan operasional secara tepat waktu akan berkontribusi terhadap upaya penyelarasan alokasi sumber daya dan tenaga kerja untuk mendorong implementasi yang konsisten. Para anggota SwissCham Indonesia mengimbau pemerintah untuk mengadopsi lebih banyak lagi platform teknologi dan digital yang terdepan untuk memastikan bahwa progres dan realisasi reformasi tersebut dimonitor dengan baik, dan perkembangan terkini dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan demi implementasi yang lebih efektif.



MAKANAN DAN MINUMAN

Industri makanan dan minuman masih menjadi salah satu sektor andalan dari sektor non-migas. Menurut data Kementerian Perindustrian, kontribusi industri makanan dan minuman kepada Produk Domestik Bruto industri non-migas mencapai 34,95 persen pada triwulan III tahun 2017, dan oleh karenanya menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi. Sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang populer untuk tujuan investasi di Indonesia. Sektor ini masih memiliki daya tarik karena Indonesia merupakan pasar yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari 255 juta orang. Oleh sebab itu, sektor makanan dan minuman diproyeksikan menjadi salah satu andalan dalam mendukung sektor industri dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menyadari potensi pertumbuhan tersebut, Pemerintah RI terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan potensi pasar dalam negeri. Pada saat ini industri makanan dan minuman menjadi salah satu pilar dalam program pemerintah 'Making Indonesia 4.0'. Untuk menyambut era revolusi industri keempat (Industry 4.0), pemerintah fokus pada 5 sektor industri, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia.

AKSI KEBIJAKAN PRO PERTUMBUHAN

1. Penyederhanaan Perizinan

Pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang bekerja untuk mengeluarkan deregulasi guna mengurangi hambatan-hambatan dalam berusaha dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, termasuk melalui penyederhanaan perizinan. Meski ada kesepakatan bahwa beberapa izin dianggap tumpang-tindih, penolakan politis dari beberapa kementerian teknis dan pemerintah daerah masih ada. Pemerintah daerah tidak bias begitu saja menyederhanakan beberapa perizinan karena izin-izin lain diwajibkan oleh pemerintah pusat melalui berbagai peraturan sektoral. Untuk mendorong daya saing Industri, SwissCham Indonesia dengan hormat menyarankan penyederhanaan lebih lanjut atas izin-izin tersebut.

2. Kepastian Pasokan Bahan Baku

Pasal 33 Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin kepastian pasokan bahan baku bagi industri. Melalui Undang-undang Perindustrian, pemerintah mendukung pertumbuhan industri dan meningkatkan daya saing terhadap pesaing dari luar negeri, dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya, jaminan pasokan bahan baku masih menjadi kendala bagi sektor makanan dan minuman di Indonesia. Kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, antar lembaga pemerintah, inkonsistensi kebijakan, dan tantangan memperoleh izin impor bahan baku, menimbulkan tantangan tersendiri bagi industri makanan dan minuman dalam memastikan pasokan bahan bakunya, seperti garam, gula, susu, dan lainnya. Ketidakpastian bisnis semacam itu menjadi hambatan bagi sektor ini.

3. Penyusunan Peraturan Berdasarkan Kajian Ilmu

Banyak peraturan baru di Indonesia yang dikeluarkan tanpa adanya diskusi dengan para pemangku kepentingan. Hal ini berakibat pada ketidaksiapan para pemangku kepentingan dan menciptakan masalah-masalah dalam kegiatan usaha mereka. Seharusnya ada kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk mengkaji, mengamati, dan memastikan bahwa peraturan baru bisa diterapkan. Salah satu cara mengatasi hal ini adalah melalui kajian akademik atas kebijakan baru tersebut, dan melalui pelaksanaan analisa dampak peraturan perundang-undangan agar pemerintah dapat memahami tentang risiko-risiko kebijakan tersebut sebelum diterbitkan.

PERATURAN/RANCANGAN PERATURAN YANG MENURUNKAN DAYA SAING INDUSTRI MAKANAN MINUMAN DI INDONESIA

Cukai terhadap Minuman Berpemanis

Kementerian Keuangan mengusulkan adanya ekstensifikasi atau penambahan obyek barang kena cukai, di antaranya adalah minuman berpemanis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak dan mengurangi konsumsi gula untuk menurunkan tingkat obesitas di Indonesia. Laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2017 merekomendasikan kepada negara-negara anggotanya untuk mengenakan cukai guna mengurangi konsumsi gula dan mengundang evaluasi lebih lanjut atas cukai pada produk minuman berpemanis. Wacana tersebut akan memaksa industri makanan dan minuman untuk melakukan reformulasi produk untuk membatasi kandungan gula. Konsumsi per kapita produk minuman dalam kemasan di Indonesia sangat kecil apabila dibandingkan dengan konsumsi gula di tataran rumah tangga dan di luar rumah. Pengenaan cukai justru dapat berakibat berkurangnya pendapatan pemerintah dari sisi pajak pendapatan dan pajak penjualan, di samping menciptakan sentimen negatif terhadap produk industri makanan dan minuman. SwissCham Indonesia memandang perlunya optimalisasi program-program edukasi masyarakat tentang pentingnya diet seimbang dan gaya hidup sehat sebagai cara mengatasi obesitas dan penyakit tidak menular di Indonesia.



Cukai Plastik

Pemerintah berencana memperkenalkan cukai baru sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak dan sebagai instrumen untuk mengontrol penggunaan plastik sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan. Ada tiga sektor industri yang akan terdampak oleh wacana mengenakan cukai terhadap botol dan kemasan plastik. Tiga sektor tersebut adalah sektor industri makanan dan minuman, industri kemasan, dan petrokimia. Besaran pengenaan cukai ditentukan dari jenis plastik yang digunakan, semakin sedikit kandungan plastik yang lebih ramah lingkungan, semakin tinggi tarif cukai. Saat ini belum ada material yang memiliki karakteristik yang sama dengan kemasan plastik untuk produk makanan dan minuman yang bisa menggantikan plastik dari sisi keamanan pangan (*foodgrade packaging material*). Pengenaan cukai terhadap kemasan produk diprediksi dapat menurunkan pendapatan pemerintah dari sisi pajak pendapatan dan pajak penjualan, dikarenakan plastik memiliki peran yang besar sebagai alternatif kemasan produk makanan dan minuman. Swisscham Indonesia ingin menyampaikan masukan untuk mengatasi masalah sampah dan lingkungan melalui pendekatan komprehensif dan holistik dengan mengundang masukan dari semua pihak dan meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan akan peran masing-masing.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

Kementerian Kesehatan sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah untuk membatasi semua bentuk iklan bagi produk makanan yang diperuntukkan bagi anak usia di bawah tiga tahun dan untuk produk makanan yang menggunakan nama dan desain yang sama dengan produk bagi anak usia di bawah tiga tahun. Rancangan peraturan disusun sebagai respon terhadap Pedoman yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 2016, yang menggunakan asumsi bahwa iklan untuk produk makanan bagi anak di bawah usia tiga tahun dan produk makanan yang memakai nama dan desain yang sama akan bertentangan dengan upaya meningkatkan pemberian ASI eksklusif.

Peraturan yang berlaku saat ini hanya membatasi iklan produk makanan yang ditujukan bagi bayi usia hingga satu tahun dengan tujuan mempromosikan pemberian ASI eksklusif. Peraturan tersebut telah memberikan hasil yang sangat baik dalam menaikkan tingkat pemberian ASI eksklusif. Industri berkomitmen untuk terus mempromosikan pemberian ASI eksklusif dan memberikan informasi bagi para orangtua dan pengasuh untuk memastikan mereka memperoleh informasi yang cukup dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan gizi untuk anak-anak mereka. SwissCham Indonesia berpendapat bahwa produk makanan yang diperuntukkan anak usia 1 – 3 tahun agar diizinkan untuk beriklan, sehingga para orang tua mendapatkan informasi yang cukup tentang produk sesuai dengan kebutuhan mereka.

Ketentuan Umum Distribusi Barang

Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang melarang produsen untuk mendistribusikan produknya ke ritel. Produsen diharuskan menunjuk distributor lokal untuk mendistribusikan produk-produknya. Ketentuan ini menciptakan inefisiensi dan biaya bagi produsen maupun konsumen. SwissCham Indonesia mengusulkan untuk penyempurnaan peraturan tersebut agar produsen dapat :

- + Mendistribusikan produknya secara langsung ke toko ritel modern. Hal ini tidak akan mengganggu bisnis distributor local karena jasa mereka tetap dibutuhkan untuk ke jalur penjualan lainnya

- + Membuka butik atau *specialty store*
- + Membuka perdagangan e-commerce untuk produknya

Pembatasan Kepemilikan Saham bagi Investor Asing di Sektor Distribusi

Pembatasan terhadap kepemilikan saham asing di sektor distribusi mencerminkan perlakuan yang berbeda terhadap investasi asing di Indonesia. Adanya perlakuan yang adil bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) merupakan hal penting untuk menciptakan iklim dan persaingan usaha yang sehat.



PERTANIAN DAN PERIKANAN

PELUANG DAN SEKILAS PANDANG INDUSTRI

Akuakultur

Akuakultur adalah sektor produksi makanan yang berkembang pesat di dunia dan pada saat ini telah melebihi porsi penangkapan ikan liar sebagai sumber utama produksi ikan. Organisasi Makanan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food & Agriculture Organisation/FAO) memperkirakan sektor akuakultur akan menghasilkan dua pertiga pasokan ikan konsumsi dunia pada 2030.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai 81.000 km, serta wilayah teritorial daratan dan perairan terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kemampuan dan kesempatan alami untuk menjadi pusat dan pemimpin budidaya perikanan yang besar di wilayah ini.

Iklim hangat tropis sepanjang tahun mendukung akuakultur untuk banyak spesies. Indonesia baru memanfaatkan 7,38% dari total potensial wilayahnya untuk akuakultur, namun telah berada di posisi ke-3 di antara negara-negara yang paling produktif dalam produksi akuakultur setelah Cina dan India (OECD/FAO 2014).

Kementerian Maritim dan Perikanan Republik Indonesia menyatakan bahwa usaha akuakultur diperkirakan akan memasok 8.76 juta ton ikan ke pasar domestik atau sebesar 60% dari konsumsi ikan negara di tahun 2019.

Kementerian menyatakan bahwa di tahun 2019 Indonesia memiliki konsumsi ikan per kapita sebesar 50 kg yang setara dengan permintaan produksi konsumsi ikan nasional sebesar 14.6 juta ton pertahun. Sebagai perbandingan, jumlah ini merupakan 2x lipat dari jumlah rata-rata konsumsi ikan di Uni Eropa yang mengkonsumsi 24kg per kapita.

Organisasi Makanan dan Agrikultur Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa konsumsi ikan dunia per kapita akan meningkat 19.6 kg pertahun pada tahun 2021 dan 22.5 kg per tahun pada 2030. Jumlah ini berada jauh di bawah konsumsi ikan per kapita saat ini di Indonesia, yang mana menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas sektor akuakultur dan pemrosesan makanan bahari, agar dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan Indonesia, melalui praktik-

praktik akuakultur yang bertanggung jawab dan model konsumerisme makanan bahari yang berkelanjutan.

Pertanian

Menurut Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, fokus utama pengembangan pertanian adalah untuk mencapai kedaulatan pangan dan pertanian. Selama periode 2015-2017, pertanian menyumbang 10,1% dari PDB nasional dan membukukan pertumbuhan rata-rata 3,3% per tahun.¹ Proporsi PDB Indonesia yang dihasilkan melalui industri pertanian meningkat menjadi IDR 84.578 miliar (USD 6.1 miliar) pada kuartal pertama tahun 2018, peningkatan yang signifikan dari IDR 43.801 miliar (USD 3.2 miliar) yang dibukukan selama kuartal keempat 2017.² Pertumbuhan PDB pada pertanian Indonesia untuk 2019 diperkirakan meningkat 4% dari angka untuk 2018. Terlepas dari pencapaian ini, Pemerintah Indonesia dapat melakukan lebih banyak untuk memperkuat kebijakannya untuk mengantisipasi masalah yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan pangan negara.

Populasi Indonesia diperkirakan akan meningkat 30% pada tahun 2050. Ini berarti bahwa 31 tahun dari sekarang akan ada lebih dari 322 juta orang yang bergantung pada makanan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, produksi pertanian harus meningkat 60%. Masalahnya, petani Indonesia semakin tua dengan sebagian besar berusia 45 tahun atau lebih. Jika tren ini berlanjut, Indonesia akan kekurangan sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian dalam waktu dekat. Umur bukan satu-satunya faktor berkurangnya jumlah petani. Produktivitas yang rendah yang disebabkan oleh kurangnya akses ke teknologi dan informasi pertanian telah memaksa banyak petani untuk memilih pekerjaan yang lebih menguntungkan, termasuk dengan bermigrasi ke daerah perkotaan.³ Karena faktor gabungan ini, Indonesia telah kehilangan sekitar 5 juta petani antara 2008-2018.⁴

Jika tidak ada langkah-langkah transformasi yang diambil untuk mengatasi masalah ini, Indonesia akan secara serius menghadapi kerawanan pangan dan penurunan ekonomi keluarga petani dalam dekade mendatang.

MEMAKSIMALKAN PELUANG UNTUK INDONESIA 4.0

Perusahaan-perusahaan Swiss yang inovatif baik di sektor akuakultur maupun pertanian merupakan tempat terbaik untuk memainkan peran kunci sebagai mitra Indonesia untuk memasuki era Industri 4.0 dengan melakukan produksi yang berbasis teknologi dan sains, dan pada saat yang sama mendukung prinsip-prinsip bisnis yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

Perusahaan Swiss di kedua industri ini berada di posisi terbaik untuk mendukung komunitas petani Indonesia untuk mempercepat inovasi guna mengatasi tantangan yang semakin meningkat bagi petani dan perubahan pandangan masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi para petani Indonesia termasuk menanam lebih banyak tanaman dengan lebih sedikit air, perubahan iklim, banjir dan kekeringan, memuaskan selera konsumen yang berubah, memenuhi meningkatnya permintaan akan lebih banyak makanan berkualitas lebih tinggi, mengadopsi teknologi baru, berinvestasi untuk membuat pertanian lebih produktif, dan meneruskan semangat untuk bertani ke generasi berikutnya.

Semua perusahaan asal Swiss didorong oleh sains, dan dengan demikian perusahaan menggunakan pendekatan transparan untuk menciptakan inovasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat, yang memasukkan pendapat-pendapat para petani dan konsumen ke dalam riset dan sains mereka. Beroperasi secara global, perusahaan menghormati peraturan internasional dan negara, sehingga dituntut untuk mengadopsi tingkat keselamatan konsumen dan lingkungan yang sangat tinggi.

¹For "Overview of Indonesia's Agricultural Policies 2018", see (http://ap.ftc.agnet.org/ap_db.php?id=903), diakses pada 30 Juli 2019).

²www.statista.com (2019).

³Creative Economy: An Engine to Improve Indonesia's Agriculture", (<http://www.aseanfoundation.org/newsroom/creative-economy-an-engine-to-improve-indonesia-s-agriculture>), diakses pada 30 Juli 2019).

⁴Indonesia Food Sovereignty Remains Elusive", (<https://www.voanews.com/east-asia-pacific/indonesia-food-sovereignty-remains-elusive>), diakses pada 30 Juli 2019).

Visi Presiden Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya selaras dengan ambisi yang disebutkan di atas, yaitu Indonesia harus memiliki daya saing dan fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi dunia yang berubah cepat dengan antara lain, mengembangkan sumber daya manusia dan membuka pintu terluas untuk investasi. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan, berkontribusi pada percepatan pembangunan negara, dan Indonesia harus menarik bagi investor, yang mengarah pada peningkatan kesempatan kerja.

AREA KEBIJAKAN YANG BUTUH KEJELASAN SERTA SOLUSI YANG PRO-PERTUMBUHAN

Akuakultur

Pertumbuhan tingkat populasi dan kemakmuran Indonesia memiliki kebutuhan dasar protein. Untuk mengarah pada percepatan konsumsi nutrisi protein yang lebih sehat, diharapkan akuakultur dapat memenuhi kebutuhan ini.

ASEAN tahun 2018 mencatat potensi industri akuakultur diperkirakan melebihi USD 339 miliar per tahun. Komitmen pemerintah Indonesia sebesar USD 1.9 miliar untuk meningkatkan sektor ini menunjukkan dukungan kuat dengan harapan menarik investor asing, yang juga berharap untuk dapat meningkatkan ekspor spesies yang berkelanjutan seperti udang dan tuna.

Meskipun terdapat permintaan kuat lokal untuk makanan laut, sebagaimana dicatat di atas, Indonesia telah menghasilkan ikan putih nomor 1 yang paling digemari oleh konsumen di pasar Amerika Serikat (Regal Springs Tilapia). Kepemimpinan ini telah dikembangkan oleh satu-satunya investasi Swiss dalam akuakultur dan pengolahan ikan yang bertanggung jawab di Indonesia

Organisasi Makanan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) telah mengkategorikan Tilapia sebagai kunci ketahanan pangan protein dunia. Indonesia telah menjadi pemimpin global dalam budidaya Tilapia yang bertanggung jawab melalui terobosan investasi Swiss ini di dalam negeri. Banyak hal yang bisa dipetik dari pengalaman ini dan diterapkan untuk mendorong lebih jauh sektor akuakultur yang bertanggung jawab.

Sebagai contoh, Indonesia pada saat ini mengembangkan tahap berikutnya dalam pembuatan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan akuakultur yang bertanggung jawab dengan melaksanakan model perizinan zonasi lingkungan hidup dengan menggunakan keahlian internasional untuk beberapa spesies seperti udang dan ikan kakap putih. Pendekatan formulasi perizinan baru ini mengambil pembelajaran yang dihasilkan oleh penerapan Perpres 81/2014, yang terkait perencanaan tata ruang Danau Toba dan wilayah sekitarnya (Perpres 81/2014).

Meskipun Perpres 81/2014 menginterpretasikan perencanaan tata ruang Danau Toba untuk menstabilisasi jumlah dan kualitas air Danau Toba yang memungkinkan pengembangan akuakultur danau, pariwisata, perkebunan berbasis ramah lingkungan milik masyarakat, Peraturan Presiden ini tidak memberikan kejelasan atas koordinat peta untuk menunjukkan industri-industri terkait di mana mereka harus beroperasi, dan untuk memberikan kepercayaan bahwa investasi mereka

untuk operasi bisnis yang bertanggung jawab dijamin keamanannya.

Contoh-contoh dari reformasi pembuatan kebijakan tersebut atau kepastian yang dibutuhkan dari dunia usaha adalah bukan hal baru di Indonesia, namun perlu ditangani dengan sangat hati-hati. Perubahan yang diinginkan yang tidak melibatkan konsultasi yang memadai dengan industridan bimbingan dari para ahli dapat mengakibatkan tidak dapat dihindarinya kehilangan ribuan pekerja karya yang telah dikembangkan bertahun-tahun, sehingga memperburuk kepercayaan investor yang telah rapuh.

Policy Paper ini membantu menghindari scenario negatif ini dapat dijadikan contoh di mana para anggota Swiss Chambers Indonesia dapat secara khusus membantu untuk membangun kepemimpinan yang telah tercipta di sektor ini.

Pertanian

Peran Positif Kepemilikan Asing

Kepemilikan/investasi asing dalam pertanian masih sangat dibutuhkan dan harus memainkan peran dalam memajukan pembangunan pertanian Indonesia di semua lini, terutama dalam bentuk transfer teknologi, keterampilan dan pengetahuan kepada petani kecil, regenerasi petani muda yang inovatif, serta revitalisasi pedesaan.

Investasi asing di bidang pertanian, khususnya yang telah berjalan lebih dari satu dekade, telah mengembangkan program kemitraan besar-besaran dengan para pelaku pertanian di Indonesia di bidang solusi teknologi pertanian inovatif. Aktor-aktor tersebut meliputi petani kecil, lembaga akademik, dan badan pemerintah daerah. Sumber daya manusia muda juga sangat terserap oleh program-program investasi asing untuk menjangkau para petani yang berlokasi di daerah-daerah terpencil dan terbelakang. Lebih lanjut, perusahaan investasi asing yang mengembangkan teknologi pertanian yang membawa solusi terhadap tantangan lingkungan yang semakin sulit bagi petani harus mampu berinvestasi secara memadai dengan hasil yang terukur dalam hal transfer penelitian dan pengetahuan kepada masyarakat lokal.

Namun sebagai contoh, UU No. 13/2010 tentang Hortikultura yang membatasi kepemilikan asing hingga hanya 30% terbukti merugikan investasi asing di industri pertanian. Penerapan undang-undang ini sejak tahun 2014 telah menyebabkan investasi asing dalam pembibitan hortikultura

menutup operasinya, hilangnya pekerjaan lokal, dan berhentinya kemitraan dengan lembaga akademik lokal dalam penelitian dan pengembangan hortikultura.

Mengingat sejarah singkat Indonesia dalam bidang bioteknologi dan kurangnya penelitian dan pengembangan dalam negeri dalam pemuliaan dan perbanyakan benih, undang-undang ini merusak produksi hortikultura negara ini.⁵ Investasi asing dalam hortikultura yang merupakan sektor intensif teknologi harus dipandang menguntungkan bagi pemerintah dan petani, karena menyediakan jalur penyediaan benih hortikultura berkualitas tinggi.

Sikap positif Presiden Jokowi terhadap peran investasi asing dalam memajukan Indonesia terlihat jelas. Meski demikian, peraturan tidak selalu konsisten dengan semangat beliau. Karena hal di atas, Pemerintah Indonesia harus menetapkan peraturan yang konsisten di semua kementerian yang relevan untuk mewujudkan visi Presiden.

Memang benar bahwa negara harus mengembangkan fondasi nasional yang kuat untuk sektor pertanian, tetapi ini tidak boleh hanya dicapai dengan memaksa investor asing untuk melepaskan/membatasi kepemilikan pengendalian usaha. Penilaian solid tentang kesiapan nasional di semua lini (yaitu tingkat teknologi, kapasitas penelitian dan pengembangan, kapasitas petani) harus dilakukan sebelum menetapkan komposisi skema kepemilikan asing.

Peta Jalan Adopsi Bioteknologi

Ilmu tanaman sangatlah penting bagi pertumbuhan agrikultur Indonesia, ketahanan pangan, dan perkemabngan ekonomi. Akses yang lebih besar atas peralatan agrikultur berteknologi maju, termasuk bibit-bibit bioteknologi, dapat membantu para petani meningkatkan panen mereka, terutama untuk tanaman pangan seperti beras dan jagung.

Laporan ISAAA (Layanan Internasional untuk Akuisisi Aplikasi Agri-biotek) mencatat bahwa area tanaman biotek global naik 3% di tahun 2017 menjadi 189.9 juta hektar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh profitabilitas yang lebih besar yang berasal dari harga komoditas yang lebih tinggi, peningkatan permintaan pasar baik domestik maupun internasional, serta kehadiran teknologi benih yang tersedia.

Negara tetangga Indonesia, Filipina, telah meningkatkan area tanaman bioteknya dan terus mengizinkan petani untuk

⁵"Killing Seeds of Food Security", (<https://www.thejakartapost.com/academia/2018/12/21/killing-seeds-of-food-security.html>, diakses pada 30 Juli 2019).

⁶"Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years", (<http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf>, diakses pada 31 Juli 2019).

⁷"Creative Economy: An Engine to Improve Indonesia's Agriculture", (<http://www.aseanfoundation.org/newsroom/creative-economy-an-engine-to-improve-indonesia-s-agriculture>, diakses pada 30 Juli 2019).

⁸"Indonesia's Aging Farmers", (<https://thediplomat.com/2018/07/indonesias-aging-farmers/>, diakses pada 30 Juli 2019).

⁹"Empowering Our Farmers", (<https://www.thejakartapost.com/academia/2019/02/15/empowering-our-farmers.html>, diakses pada 31 Juli 2019).

mengadopsi bioteknologi dalam produksi pangan karena petani kecil telah melihat peningkatan langsung dari biotek. Komersialisasi biotek (jagung) di Filipina dimulai pada tahun 2003, mengikuti peraturan ketat yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian untuk penanaman biotek yang disetujui dan ditandatangani pada tahun 2002. Melalui ini, Filipina menjadi negara pertama yang menanam tanaman biotek di Asia Tenggara, dan telah menjadi model kebijakan regulasi berbasis ilmu pengetahuan dan menyeluruh di wilayah ini.⁶

Indonesia, di lain pihak, masih belum memiliki sikap tegas dan dukungan untuk tanaman bioteknologi, terbukti dengan kurangnya kerangka peraturan yang berlaku, seperti pedoman pelepasan varietas dan pemantauan pasca budidaya, yang akibatnya mencegah para pendukung teknologi meluncurkan produk mereka di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia diminta untuk membuat peta jalan bagi komersialisasi tanaman bioteknologi yang mencakup pemetaan dan identifikasi celah peraturan.

Perusahaan pertanian dengan investasi asing yang mendukung hal ini siap menjadi sumber data dan informasi untuk membantu pemerintah membentuk kebijakan yang diperlukan bagi tanaman biotek, dan Pemerintah Indonesia perlu mendorong investasi dan pengembangan di bidang penelitian bioteknologi dengan menawarkan perlindungan peraturan yang kuat kepada para pemrakarsa, serta memungkinkan investasi untuk berkembang di bidang ini.

Ilmu sebagai Referensi dalam Pengembangan Kebijakan Pertanian

Peraturan sektor pertanian dan produk pertanian memiliki tingkat keamanan konsumen dan lingkungan tertinggi. Peraturan Pemerintah Indonesia kemudian harus mendukung investasi dalam teknologi yang penting bagi petani dan lingkungan, sehingga harus mempertimbangkan bukti berbasis ilmu pengetahuan tentang keamanan dan kualitas produk pertanian. Petani Indonesia menghadapi tantangan seperti berkurangnya lahan pertanian produktif, degradasi tanah, perubahan iklim, kekeringan, kelangkaan air, dan banjir yang mengancam produktivitas pertanian mereka. Inovasi teknologi pertanian adalah yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut, dan dapat mengarah pada promosi komunitas sains Indonesia dalam proses pembuatan kebijakan yang menyeimbangkan antara inovasi pertanian dan perlindungan lingkungan.

Pendaftaran Pestisida

Untuk meningkatkan investasi di industri pestisida, kepastian yang lebih besar atas peraturan dan iklim bisnis yang lebih kondusif dibutuhkan untuk meningkatkan investasi. Revisi Peraturan Menteri pertanian No. 39/Permentan/SR.330/7/2015 (Permentan 39) tentang Pendaftaran Pestisida telah sangat ditunggu oleh industri. Peraturan ini menetapkan peta jalan untuk implementasi yang lebih tertib, dan menawarkan focus yang jelas untuk pengadaan pestisida berkualitas bagi para petani Indonesia, yang kemudian meminimalkan bahaya yang biasa disebabkan produk-produk palsu atau di bawah standar. Revisi peraturan itu dapat membantu menciptakan proses pendaftaran pestisida yang lebih efektif, efisien, dan didukung sains, dan pada akhirnya menyelaraskan system legalisasi dengan standar global untuk pendaftaran pestisida.

Posisi Pada Konvensi Internasional

Dalam menanggapi berbagai konvensi dan protokol internasional yang memengaruhi sektor pertanian, Indonesia sering menghadapi tekanan tinggi yang mengancam proses pengambilan keputusannya. Para ahli pertanian Indonesia dan asing perlu bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan posisi kebijakan yang kuat dalam menghadapi konvensi dan protokol internasional. Mekanisme penilaian yang menyeluruh dibutuhkan untuk memenuhi kriteria yang diminta oleh konvensi/protokol internasional, yang mempertimbangkan sains yang terbukti, bukti/riset lapangan, minat para petani Indonesia, serta kedaulatan tenaga kerja dan pangan nasional, yang mana terus-menerus dipromosikan oleh Presiden Jokowi.

Di saat yang sama, konvensi/protokol semestinya tidak menjadi alat untuk menciptakan kendala non-tarif bagi produksi agrikultur Indonesia, sehingga menghambat daya saing produk-produk agrikultur negara di pasar internasional.

Mengembangkan Peta Jalan yang Bisa Diterapkan untuk Regenerasi Petani

Meningkatkan inovasi teknologi di bidang pertanian tidak akan menuai potensi penuhnya dalam mewujudkan ketahanan pangan jika jumlah petani di Indonesia berkurang dari tahun ke tahun. Sehubungan dengan ini, peta jalan dan peraturan yang dapat ditindaklanjuti harus dikembangkan untuk mendukung dua usulan:

1. Program nasional terpadu untuk mendukung petani muda (regenerasi) baik di daerah pedesaan maupun perkotaan;
2. Meningkatkan ekonomi kreatif sebagai wahana untuk menarik kaum muda dengan keterampilan yang relevan dan ide-ide inovatif untuk mengambil keputusan dan menyumbangkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk mengatasi masalah pertanian di Indonesia.

Mengubah stigma negatif yang sudah lama ada tentang pertanian pada generasi muda adalah tugas besar bagi Indonesia. Salah satu cara bagi pemerintah Indonesia untuk menarik generasi muda ke sektor pertanian adalah melalui inovasi. Investasi asing di bidang pertanian yang didorong oleh teknologi, sains, dan inovasi, haruslah disambut, dan dijadikan prioritas untuk membantu pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan ini.

Manifestasi ekonomi kreatif terbukti karena semakin banyak usaha rintisan (*startup*) pertanian telah berdiri sejak lima

tahun terakhir di Indonesia, dan mereka telah memainkan peran kunci dalam membentuk kembali lanskap pertanian di Indonesia. Perusahaan rintisan pertanian di Indonesia telah mampu mengatasi masalah klasik yang dihadapi petani kecil Indonesia; mendapatkan pinjaman, latar belakang pendidikan rendah, rantai pasokan pertanian yang panjang dan kompleks, pengetahuan pertanian berkelanjutan, dan fasilitas pembelajaran berkelanjutan.⁷

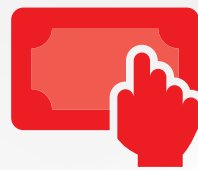
Program nasional terpadu dengan peta jalan yang dapat ditindaklanjuti akan menegakkan peraturan yang sinkron antar kementerian-kementerian terkait untuk mendukung jalur solusi di atas. Upaya saat ini untuk menggali pemberdayaan pemuda di bidang pertanian jarang dimasukkan ke dalam rencana resmi dan kemitraan dengan lembaga terkait belum mendapatkan banyak daya tarik dalam hal menjangkau para pemuda.⁸ Kontribusi dari industri pertanian, terutama yang dimiliki asing, harus memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan ini.

Revitalisasi Tenaga Penyuluh Pertanian

Implementasi otonomi daerah pada tahun 2001 tampaknya telah mengesampingkan penyuluh pertanian, yang telah memberikan kontribusi besar untuk memberdayakan petani dan meningkatkan produktivitas selama hampir tiga dekade sejak akhir 1990-an. Presiden Joko Widodo mengakui perlunya merevitalisasi layanan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani, tetapi kapasitas pemerintah untuk perekrutan sangat dibatasi oleh anggaran.⁹

Kurangnya minat generasi muda dalam pertanian telah memperburuk masalah ini. Revitalisasi tidak hanya bertumpu pada menanamkan pengetahuan baru tentang teknologi pertanian terbaru pada pekerja penyuluhan, tetapi juga harus tentang merekrut pekerja muda yang mahir dalam menyebarluaskan pengetahuan tentang produk dan layanan pertanian yang sarat dengan teknologi terbaru.

Di sinilah perusahaan-perusahaan berbasis sains dan teknologi dapat memainkan peran dalam mendukung pemerintah Indonesia mengimplementasikan program-program negara untuk revitalisasi para penyuluh petani. Perusahaan-perusahaan yang berasal dari Swiss dapat mendukung peningkatan akses para penyuluh pada teknologi-teknologi yang tepat dan maju, yang cocok untuk kondisi lapangan. Mengingat beragamnya kondisi ekologis di negara ini, satu strategi untuk semua tidaklah tepat. Yang dibutuhkan adalah sistem koordinasi yang baik antara pemerintah, publik, dan organisasi-organisasi swasta.



JASA

IDE DAN MASUKAN UNTUK Mendukung Sektor Finansial Non-Bank

Sektor asuransi Indonesia adalah salah satu sektor yg pertumbuhannya pesat dan paling menjanjikan di Asia Tenggara, berkat pertumbuhan ekonomi yang juga pesat dan populasi yang semakin mampu membeli produk asuransi.

Latar Belakang Ringkasan

Sektor Jasa Keuangan Non-Bank yang terdiri dari perusahaan asuransi, manajemen aset, perusahaan dana pensiun dan keuangan, diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mandiri, sebuah badan regulator terintegrasi yang berdiri pada tahun 2013 di bawah Undang-Undang No. 21 tahun 2011 untuk mengawasi sektor jasa keuangan, melindungi nasabah, dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan industri.

Sejak pembentukannya, OJK telah mengambil langkah-langkah yang dikagumi dengan melindungi nasabah dan memastikan kelangsungan finansial jangka panjang para peserta industri. Peraturan pertama yang diundangkan oleh OJK adalah POJK No. 1/POJK.07/2013 yang mengatur perlindungan nasabah oleh perusahaan jasa keuangan. Regulasi ini memperkenalkan rezim yang memberikan standar bagi para pemain jasa keuangan, yang mencakup segalanya, mulai dari kontrak terstandarisasi hingga penanganan keluhan nasabah.

OJK dituntun oleh Strategi Literasi Keuangan Nasional, suatu cetak biru yang bertujuan membangun inklusi keuangan dan yang terdiri dari 3 pilar utama: (1) Kampanye dan pendidikan literasi keuangan nasional; (2) Memperkuat infrastruktur literasi keuangan; (3) Pengembangan produk dan jasa keuangan.

Memaksimalkan Kesempatan Asuransi

Asuransi

Industri asuransi global memasuki Indonesia karena mereka sadar bahwa sektor ini memiliki tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 20% yang berupa premi kotor asuransi, dan 26% berupa aset sejak tahun 2007. Perusahaan-perusahaan Swiss yang telah beroperasi di Indonesia sejak 30 tahun lalu-lah yang bekerja membangun potensi industri ini. Ada banyak kesempatan bagi Indonesia

untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Swiss, dengan masih terbatasnya penetrasi sektor asuransi di angka 6.7% dari total populasi (asuransi jiwa), dan 0.47% (asuransi umum), yang mana merupakan angka yang sangat kecil dibandingkan dengan negara lain. Faktanya, 43 juta dari 53 juta pemegang polis asuransi jiwa merupakan nasabah korporasi. Hampir 10 juta pemegang polis asuransi jiwa individu mewakili penduduk Indonesia yang lebih berada.

Tindakan Kebijakan yang Pro Pertumbuhan

Menciptakan Iklim Investasi yang Berkelanjutan di Indonesia

OJK diharapkan melanjutkan penegakkan dan promosi iklim investasi yang berkelanjutan di industri jasa keuangan dengan menciptakan peta jalan industri yang ramah investor dan mengikutsertakan sektor swasta dalam pengembangannya. Hal ini akan memberikan kepastian yang lebih besar bagi para investor dalam menyusun rencana dan strategi investasi jangka panjang mereka di Indonesia.

Meningkatkan Struktur Operasional OJK, Kolaborasi Internal, dan Sinergi dengan Institusi Pemerintah Lainnya

Untuk memudahkan kegiatan bisnis, OJK diharapkan memastikan efisiensi dan efektivitas kolaborasi antar divisi (bank, pasar modal, asuransi), khususnya pada saat pembuatan peraturan, dan ketika meninjau permohonan persetujuan atas transaksi dan investasi. Menciptakan sinergi yang efisien dan efektif dengan institusi pemerintah dapat memperkuat kepercayaan investasi.

Menciptakan Biaya OJK yang Transparan

OJK mempublikasikan laporan keuangannya yang telah diaudit pada situsnya, tetapi metodologi yang digunakan untuk menghitung biaya berdasarkan aset yang wajib dibayar oleh perusahaan jasa keuangan dan penggunaan dana tersebut perlu transparan guna memastikan kepercayaan pada operasional OJK. Organisasi-organisasi Swiss dengan bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi industri siap

untuk ikut serta dalam diskusi-diskusi untuk mendukung pembentukan mekanisme biaya OJK yang transparan guna memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan pendirian OJK.

Pengawasan Terintegrasi atas Konglomerasi Keuangan

OJK diharapkan menyelesaikan pembentukan mekanisme pengawasan yang terintegrasi untuk peningkatan industri jasa keuangan sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan pengawasan terintegrasi OJK. Rancangan peraturan ini memperkenalkan konsep badan yang memimpin konglomerasi keuangan yang akan bertanggung jawab untuk mengintegrasikan implementasi manajemen risiko dalam konglomerasi keuangan. Pembentukan peraturan tersebut, jika didukung oleh hukum korporasi, dapat memudahkan konglomerasi untuk mengelola risiko lebih baik dan untuk mengatur aktivitas-aktivitas secara lebih efisien. Mengizinkan penggunaan jasa bersama dari perusahaan-perusahaan satu grup di Indonesia untuk meningkatkan layanan kepada nasabah dan memperkuat efisiensi, akan sangat disambut baik oleh industri dan terlihat sesuai dengan arah peraturan tentang manajemen risiko grup dan konglomerasi keuangan.

Mengembangkan Keahlian yang Penting dalam Aktuaria, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Underwriting

Pilar stabilitas pertumbuhan dan pembangunan sektor jasa keuangan yang stabil dan dipercaya bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia yang berada di posisi menentukan. Jutaan bangsa Indonesia dengan kemampuan terbatas kemungkinan besar akan menaruh kepercayaan pada asuransi kesehatan, jiwa, dan lainnya di masa-masa kritis dan membutuhkan. Dengan mengembangkan program-program yang mendorong pertumbuhan sumber daya manusia di bidang aktuaria, kepatuhan, manajemen risiko, dan *underwriting*, Indonesia memastikan kesehatan ekonominya di jangka panjang. Investasi pembangunan kapasitas yang ditargetkan pada ilmu aktuaria dan fungsi-fungsi pada lini kedua pertahanan, termasuk kepatuhan

dan manajemen risiko, akan memberikan dampak yang mendalam pada kualitas dan tingkat pertumbuhan sistem keuangan bangsa di masa mendatang dengan potensi dampak yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Ada beberapa program pengembangan yang sedang didukung oleh industri, di mana akademisi dapat menanggapi kebutuhan-kebutuhan ini, dan Swiss dapat berperan lebih besar di sini. Inisiatif semacam itu sangat sesuai dengan ambisi dan arah OJK, serta tujuan pemerintah Indonesia yang lebih luas untuk meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan dan menumbuhkan kelas menengah.

Proyek Manajemen Risiko, Kelestarian Ekonomi, dan Pengembangan Ilmu Aktuaria di Indonesia (*Risk Management, Economic Sustainability and Actuarial Science Development in Indonesia/READI*) adalah salah satu inisiatif jangka pendek yang telah memperoleh dukungan cukup luas dari industri, memperkenalkan profesi aktuaria pada tingkat akar rumput. Untuk memberikan kesinambungan pada momentum yang dibentuk melalui proyek READI, badan-badan industri lokal yang relevan (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Persatuan Aktuaris Indonesia) diharapkan mengambil kepemimpinan yang lebih besar ke depannya.

Melindungi Kebebasan Pilihan Konsumen

Sektor swasta dapat menjadi mitra yang efektif untuk badan usaha milik negara (BUMN) dan badan-badan pemerintah lainnya, dalam memengaruhi penyusunan kebijakan publik dan mencapai tujuannya. Sektor swasta dan BUMN dapat saling melengkapi dalam memberikan solusi bagi konsumen. Contohnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengatur sistem manfaat wajib kesehatan dan ketenagakerjaan, yang tujuan utamanya adalah meningkatkan jumlah rakyat Indonesia yang memiliki akses kepada layanan kesehatan dasar dan jaring pengaman sosial tidak dapat dipungkiri. Meski demikian, peran sektor swasta dalam menyediakan jasa kesehatan dan pensiun yang berkualitas perlu secara adil diakui dan dilindungi untuk memastikan kebebasan pilihan konsumen.

Pendekatan yang sama diharapkan dapat diambil terhadap perlindungan aset sektor publik; memperbolehkan perusahaan sektor swasta untuk berada secara kompetitif atas perlindungan komersial atas aset publik adalah untuk kepentingan terbaik dari pembayar pajak Indonesia.

Akhirnya, pengenalan perlindungan tanggung jawab yang diwajibkan pada batas minimum tertentu untuk semua ruang terbuka publik akan menguntungkan kepentingan publik dimana akan memenuhi jenjang perlindungan yang sangat dibutuhkan bagi mereka yang terluka di ruang publik. Pengenalan asuransi



Proyek READI adalah salah satu inisiatif jangka pendek yang telah memperoleh dukungan cukup luas dari industri

motor pihak ketiga yang diwajibkan juga akan memberikan proteksi kepada para korban dan mereka yang terluka dalam kecelakaan lalu lintas, serta kerusakan pada properti dan infrastruktur akibat kecelakaan tersebut. Pengenalan perlindungan-perindungan yang diwajibkan tersebut akan membuat Indonesia seimbang dengan negara-negara lain, dimana perlindungan-perindungan tersebut dianggap perlu untuk melindungi kepentingan publik.

Dana Jaminan Pemegang Polis Asuransi

Pembentukan suatu dana untuk melindungi pemegang polis Indonesia apabila perusahaan asuransi mereka jatuh, akan membangun kepercayaan masyarakat pada industri. Untuk memastikan implementasi yang adil atas dana tersebut, diharapkan dana tersebut dapat dikelola dengan baik dengan pengawasan tinggi guna memastikan perlakuan yang terstandarisasi bagi semua perusahaan asuransi. Di negara-negara lain, ada kesempatan bagi sektor swasta untuk berperan dalam tata kelola dan akuntabilitas dari efektivitas institusi ini.

Peran Positif Kepemilikan Asing

Kepemilikan dan partisipasi asing diharapkan dapat disambut dalam sektor jasa keuangan seiring dengan kebutuhan industri akan modal dan keahlian asing yang signifikan untuk masa depan yang terencana.

Limitasi kepemilikan asing dalam perusahaan asuransi adalah sampai dengan 80% dimana 20% harus dimiliki oleh pihak Indonesia. Perusahaan patungan dimana kepemilikan asing di atas 80% tanpa *grandfathering* harus mematuhi ketentuan tersebut selambatnya pada tahun 2020 atau opsi kedua adalah untuk perusahaan patungan menjadi perusahaan terbuka – suatu tantangan bagi investor asing karena kurangnya opsi untuk mitra lokal yang bonafide.

Penegakan Peraturan

OJK bersama dengan asosiasi-asosiasi asuransi yang relevan diharapkan untuk memastikan penegakan peraturan yang lebih baik guna memastikan kepercayaan publik pada institusinya dan mandatnya. Penerapan peraturan

yang konsisten terhadap para peserta industri juga membawa kepastian hukum dan perlakuan adil yang lebih baik bagi semua pemain industri. Pendekatan OJK yang lebih proaktif dalam membuat rencana penyelesaian bagi perusahaan asuransi yang sedang kesulitan akan membantu meningkatkan kepercayaan publik dan menurunkan risiko sistemik yang dapat terjadi jika para peserta yang lemah diperbolehkan untuk melanjutkan usaha mereka.

Membuka Potensi Asuransi dan Jasa Keuangan Syariah di Indonesia

Melalui kerja sama yang erat dengan industri, OJK diharapkan merancang dan mempromosikan peraturan-peraturan yang mendukung pertumbuhan jasa asuransi dan keuangan syariah di Indonesia yang sejalan dengan “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024”. Hal ini diharapkan memberikan kejelasan yang lebih baik seputar model operasional di masa mendatang yang dapat diterima oleh pemain-pemain yang ada, juga memastikan bahwa biaya-biaya kepada nasabah tidak dinaikkan.

Fokus yang lebih besar pada jasa keuangan terhadap populasi muslim negara ini memiliki potensi untuk mendorong Indonesia menjadi salah satu pasar Syariah teratas di dunia.

Teknologi dan Peraturan Digital

Memberdayakan perusahaan-perusahaan untuk menjadi digital sambil menyesuaikan dengan peraturan-peraturan global, sangat penting dalam mewujudkan sektor Industri Finansial Non-Bank yang lebih sehat dan inovatif. Regulator diharapkan mempromosikan penggunaan alat digital yang meningkatkan efektivitas pemberian jasa kepada nasabah, menurunkan biaya, sekaligus meningkatkan daya akses nasabah ke produk asuransi bagi masyarakat Indonesia yang aktif menggunakan internet. Hambatan-hambatan untuk menjadi jasa keuangan yang 100% digital (seperti persyaratan yang tidak sesuai zaman untuk menggunakan “tanda tangan basah”) menghalangi tujuan inklusi keuangan yang lebih luas.



Basis data yang tersimpan di luar negeri mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk menggunakan off-shoring untuk mengelola basis data global mereka

Basis data yang tersimpan di luar negeri mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk menggunakan *off-shoring* untuk mengelola basis data global mereka demi efisiensi dan manajemen risiko, serta untuk menyediakan jasa dan keamanan yang lebih baik bagi nasabah Indonesia. Pemerintah Indonesia dan OJK harus waspada bahwa peraturan-peraturan seperti Peraturan Pemerintah 82 (PP 82) dan naskah Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik—yang belum sepenuhnya dikaji atau diterapkan secara penuh—tidak memiliki konsekuensi yang mengkontradiksi maksud pembuatan peraturan-peraturan tersebut.

Peraturan OJK pada saat ini mensyaratkan penyimpanan beberapa jenis data di Indonesia, yakni pembayaran premi dan klaim, data pribadi pemegang polis dan tertanggung, serta data dan administrasi dalam rangka administrasi badan hukum.

Terkait polis elektronik, meski Peraturan OJK No. 23/2015 telah memberi ruang untuk polis elektronik berdasarkan persetujuan awal dari nasabah, Peraturan yang sama mengharuskan ringkasan polis dicetak untuk memenuhi persyaratan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Kejaksaan Agung bisa mengeluarkan pernyataan untuk mensahkan dokumen elektronik. Kami berharap pemerintah Indonesia merevisi KUHD terkait polis elektronik dan mengharmonisasikan Peraturan Pemerintah 82.

Terakhir, OJK juga perlu mengizinkan setiap perusahaan asuransi pecahan yang baru untuk di antaranya tetap menggunakan platform perusahaan induk, jaringan kantor, dan platform operasional.

Penyederhanaan Pengenalan Nasabah

Untuk meningkatkan penetrasi pasar, diharapkan prosedur pengenalan nasabah perusahaan asuransi dapat disederhanakan. Diharapkan PPAK dan semua sektor dalam OJK terlibat mengingat adanya produk-produk yang antar sektor.

Administrasi Perpajakan

Untuk memastikan kepastian lingkungan bisnis dan fondasi untuk pertumbuhan bisnis yang positif, Dirjen Pajak diharapkan membangun konsistensi yang lebih baik atas penerapan peraturan pajak yang terkait dengan perlakuan atas cadangan perusahaan asuransi sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Selain itu, untuk memaksimalkan sinergi pemerintah, Kantor Pajak akan diuntungkan dengan mengharmonisasikan tindakannya dan memprosesnya bersama OJK.

Area lain yang diharapkan mendapat perhatian—dan sesuai dengan tujuan negara untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar—yakni mempertimbangkan pengembangan lingkup produk finansial dengan keuntungan pajak (misalnya pembebasan pajak atas kontribusi, pembebasan pajak atas pengembangan investasi, pengenaan pajak atas penarikan), untuk menciptakan kumpulan modal domestik yang dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur negara dengan mengurangi ketergantungan pada modal asing. Skema yang sama di negara-negara lain telah menjadi landasan dari pendanaan jangka panjang untuk infrastruktur, dan telah mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan yang stabil.

Area lain yang membutuhkan perhatian adalah manfaat pajak yang terkait produk-produk akumulasi jiwa, yang dananya bias diinvestasikan pada proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Sejak tanggal 12 Agustus 2019, Pemerintah memberikan pengurangan tarif pajak penghasilan atas penghasilan obligasi yang diterima oleh kontrak investasi kolektif dalam bentuk dana investasi infrastruktur. Tarif awal adalah 15% namun berkurang menjadi 5% sampai dengan 2020 dan 10% sejak 2021 ke depan. Adapun selain pada kontrak investasi kolektif, Pemerintah dapat memilih untuk menerima dana infrastruktur dari dana unit-link dengan menyediakan keuntungan pajak bagi produk asuransi. Dana unit-link dapat diinvestasikan pada obligasi Pemerintah yang dikhususkan untuk proyek infrastruktur ataupun instrumen lain yang cocok. Keuntungan pajak dapat berupa pengurangan tarif pajak penghasilan untuk obligasi pemerintah, sama seperti kontrak investasi kolektif, atau premi unit-link dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan untuk pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Obligasi pemerintah dapat menjadi opsi investasi yang menarik bagi perusahaan asuransi karena tidak adanya batasan besaran investasi dari OJK.

Detarifikasi dan Implementasi Tarif

Saat ini tarif berlaku untuk risiko motor dan properti, dan hal ini sudah berlangsung sejak 2014 untuk mengontrol profitabilitas yang menurun pada area ini. Persyaratan tarif hanya untuk 5 tahun dan sekarang sedang didiskusikan rencana ke depannya. Hasil yang paling diharapkan bagi perusahaan asuransi adalah detarifikasi dan pindah ke penilaian pasar terbuka penuh yang dapat mendorong kompetisi pasar. Langkah tersebut mengizinkan perusahaan asuransi membuat perhitungan-perhitungan harga yang berbeda dan dinamis, berdasarkan risiko, sehingga dapat mengajukan penawaran yang lebih kompetitif dan fokus pada nasabah.

Kriminalisasi Hukum Perdata

Suatu jaringan individual yang dipimpin oleh seorang pengacara menyalahgunakan perusahaan asuransi dengan mengajukan laporan pidana yang tidak berdasar kepada pengadilan terhadap beberapa perusahaan asuransi yang (i) menolak klaim yang disalahgunakan (di mana pemegang polis dan tertanggungnya adalah anggota jaringan tersebut); atau (ii) dugaan penjualan yang tidak etis (di mana agennya adalah anggota jaringan tersebut). OJK dan AAJI diharapkan untuk tidak mengkriminalisasikan hukum perdata dengan bekerja sama dengan kepolisian untuk menerbitkan peraturan-peraturan dan pedoman operasional.



KEMITRAAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN

Ide & Masukan untuk Mendukung Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan

Di semua sektor tempat mereka beroperasi, perusahaan-perusahaan Swiss menghadapi tantangan yang sama terkait masalah sumber daya manusia. Negara dan perusahaan-perusahaan Swiss, dengan sejarah dan pengalaman yang panjang di dunia pendidikan kejuruan ganda mampu dan ingin ambil bagian dalam upaya penguatan sistem pendidikan kejuruan Indonesia. Seperti halnya di Swiss, sistem pendidikan kejuruan yang kuat yang berangkat dari tradisi operasional yang mumpuni dan bekerja sama erat dengan sektor swasta, bisa berkontribusi pada pengembangan tenaga kerja yang kompeten.

Keterlibatan Swiss dalam Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Indonesia

Sebagai tulang punggung ekonominya, Swiss mempertahankan sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan ganda berorientasi industri yang mapan dan kuat. Swiss, dalam kerja sama teknis dengan Indonesia, telah dilibatkan dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan sejak awal tahun 1970-an. Hal ini menghasilkan pengakuan positif dari para mitra pemerintah maupun publik. Beberapa lembaga terkemuka yang telah didukung adalah:

- + National Hotel Institute, NHI Bandung - sekarang: STP Bandung
- + Politeknik Mekanik Swiss, PMS Bandung - sekarang: POLMAN Bandung
- + Sistem politeknik, 14 lembaga di seluruh Indonesia dan Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik, PEDC di Bandung
- + Vocational Education Development Center, VEDC Malang (Pusat Pelatihan untuk Guru SMK)

- + ATMI (Akademi Teknik Mesin Industri) Solo yang sebagian didukung oleh Pemerintah Swiss

Saat ini, ada kerja sama yang berlangsung untuk mendukung rencana dan prioritas Presiden Joko Widodo untuk pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan.

- + Keahlian untuk Daya Saing (*Skills for Competitiveness/ S4C*), yang mendukung lima politeknik di bawah kerja sama dengan Kementerian Industri dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- + Pengembangan Pendidikan Pariwisata yang Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Education Development/STED*), yang mendukung suatu poli-pariwisata di Lombok, di bawah kerja sama dengan Kementerian Pariwisata
- + Proyek Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development Project/SUSTOUR*), yang mendukung lima SMK pariwisata di Flores dan Wakatobi, di bawah kerja sama dengan Kementerian Pariwisata

Di sisi lain, berbagai industri Swiss di Indonesia telah memperkenalkan dan menjalankan program-program pelatihan kejuruan secara *in-house* untuk secara langsung mengembangkan angkatan kerja yang mereka butuhkan.

Angkatan Kerja yang Berkualitas dan Kompeten sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi

Pada pidato kenegaraan tahunannya, Presiden Jokowi menekankan visinya untuk membangun sumber daya manusia Indonesia pada masa jabatannya yang kedua. Untuk merealisasikan visi tersebut, Indonesia membutuhkan reformasi besar-besaran dalam bidang pendidikan dan lembaga kejuruan.

Meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan sektor swasta dari tingkat SMK maupun politeknik akan menjadi faktor keberhasilan utama bagi peningkatannya adalah a) kurikulum yang memenuhi kebutuhan industri. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan sektor swasta dalam proses pengembangannya; dan b) para guru dan instruktur yang kompeten dan berorientasi praktik. Hal ini dapat dicapai dengan memaparkan para guru terhadap dunia kerja melalui program magang industrial bagi mereka dan melibatkan para praktisi industri dalam proses belajar mengajar. Realisasi program 'Rekognisi Pembelajaran Lampau' merupakan kondisi awal yang penting untuk hal tersebut. Pada umumnya, kerja sama erat antara sekolah dan industri sangat dibutuhkan.

a) Kerja sama erat antara sekolah dan industri

Aspek sekolah kejuruan yang sangat dibutuhkan adalah hubungan mereka dengan industri dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan lembaga bisnis. Di Indonesia, ada kesenjangan budaya antara kedua entitas ini: banyak para guru dan kepala sekolah yang tidak memahami cara untuk membangun hubungan dan menjaga komunikasi dengan pemimpin industri, dan di sisi lain, industri membutuhkan dan mencari tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Seharusnya ada banyak peluang untuk bekerja sama, misalnya menyediakan perlengkapan dan peralatan yang tepat untuk pelatihan *in-house*, secara berkala praktisi dari industri menjadi instruktur tamu yang dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman, atau mengundang para guru untuk mendapatkan pelatihan praktik di perusahaan. Keterlibatan dalam industri seperti ini akan membawa pengaruh positif kepada para lulusan, meningkatkan kompetensi profesional mereka, dan memberikan kesempatan kerja yang lebih baik bagi mereka.

Karena posisinya sangat strategis, kemitraan ini perlu menjadi tanggung jawab manajemen puncak, yakni kepala sekolah atau general manager, atau pimpinan perusahaan. Mereka adalah orang-orang yang memegang dan memiliki kewenangan terhadap keputusan dan kebijakan organisasi. Kerja sama harus didefinisikan dalam kesepakatan kerja sama dengan rencana implementasi yang menentukan aktivitas yang akan diimplementasikan dalam waktu tertentu. Arah strategis yang diberikan oleh para pemimpin dan tindakan nyata yang dilakukan anggota tim akan menentukan kualitas kemitraan dan hubungan jangka panjang antara lembaga pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan (TVET), dengan industri.

b) Kurikulum, memenuhi kebutuhan industri

Keahlian dan kemampuan para lulusan TVET harus dapat memenuhi kebutuhan industri. Hal ini membutuhkan program pelatihan yang memadai dan berorientasi praktik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu, keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum sangat penting untuk mengintegrasikan kompetensi inti dan keahlian yang dibutuhkan para lulusan. Sayangnya, industri seringkali tidak dilibatkan dalam rancangan kompetensi dan kurikulum yang dibutuhkan. Terdapat metodologi seperti DACUM (*Developing a Curriculum*/Mengembangkan Kurikulum) bagi analisis pekerjaan untuk melibatkan dan menghubungkan industri dengan sekolah, terutama politeknik. Untuk SMK, kurikulum nasional ditentukan oleh Kementerian Pendidikan namun ada ruang bagi masing-masing SMK untuk memasukkan kandungan lokal. Dalam kerja sama erat dengan mitra industri, porsi kandungan lokal ini dapat dimanfaatkan untuk menutupi kesenjangan antara kurikulum yang ada dan kebutuhan industri setempat.

c) Para guru dan instruktur yang kompeten dan berorientasi praktik

Dari semua tantangan yang ada, kapasitas guru merupakan tantangan terbesar yang dihadapi sekolah kejuruan. Indonesia tidak memiliki guru kejuruan yang memadai, dan kualitas atau kompetensi profesional mereka rata-rata masih rendah. Sebagian besar guru TVET memiliki kualifikasi akademis, namun pengetahuan praktik industri dan pengalaman kerja hampir tidak ada.

Program Magang Guru bagi para guru sekolah kejuruan untuk mendapatkan pengalaman mengenai realitas praktik di dalam industri harus dilakukan secara berkala untuk mempelajari tren baru, supaya dapat mengikuti sektornya dengan lebih baik. Program magang tersebut juga memberikan peluang kepada para guru untuk membangun hubungan dengan industri, mendapatkan informasi bisnis dan mempelajari produk, perlengkapan, serta peralatan baru. Semua ini dapat ditransformasikan menjadi bahan dan metode mengajar yang baru sehingga akan meningkatkan kualitas pengajarnya. Seorang guru kejuruan yang selalu mengikuti tren industri akan dapat menyampaikan perkembangan terbaru atau terakhir kepada para siswanya dengan cara yang inovatif dan praktis.

d) Rekognisi Pembelajaran Lampau

Melibatkan profesional dari sektor industri sebagai instruktur akan sangat berguna bagi program kejuruan, bahkan meskipun mereka tidak memiliki gelar akademis. Pemerintah Indonesia mengakui potensi ini dan telah memperkenalkan kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL pada tahun 2016. Program seperti ini memungkinkan keterlibatan profesional berpengalaman dalam proses belajar mengajar secara formal.

Memaksimalkan Peluang pada Pelatihan Kejuruan di Indonesia

Semua faktor yang disebutkan di atas sangat penting untuk mencapai visi Presiden Jokowi, yakni untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, dan keunggulan operasional di industri.

Pemerintah Swiss dan para anggota korporasi SwissCham Indonesia sangat ingin untuk terlibat dan mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem TVET. Dari sektor swasta, ada berbagai peluang kerja sama, yang dapat meliputi:

- + Membangun atau memperluas program pelatihan keahlian internal perusahaan
- + Bermitra dengan lembaga pelatihan (poli dan/atau SMK) dengan program **Link and Match** untuk melaksanakan program pelatihan ganda
- + Menyediakan peluang pelatihan *on-the-job* bagi para guru/instruktur dan siswa untuk mendapatkan pengalaman praktik
- + Mendelegasikan profesional dari perusahaan untuk menjadi instruktur tamu
- + Terlibat dalam proses pengembangan kurikulum

Dengan keterlibatan tersebut SwissCham Indonesia dan para anggota korporasinya dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan dalam pendidikan kejuruan untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

Anggota-anggota Pendiri



Anggota-anggota Emas



Anggota-anggota Perak



Anggota-anggota Perunggu

PT Abadinusa Usahasemesta | PT ABB Sakti Industri | PT Aquafarm Nusantara (a member of Regal Springs Group)

PT Green Real Estate | Bahar | PT Bahar Konsultan Indonesia | PT Berca Schindler Lifts

PT Buehler Indonesia | PT Buaya Travel Indonesia | PT Capsugel Indonesia

PT Chapters Indonesia Sehat | PT Cyberquote Indonesia | PT Darano Golf Indonesia

PT Dormakaba Access Indonesia | PT DKSH Indonesia | PT Dufrindo International

PT Egon Zehnder International | Eurasian Realty Pte. Ltd. (Singapore) | PT Ferring Pharmaceuticals Industry

PT Firmenich Indonesia | PT Integrity Indonesia | PT Koltiva

La Prairie Indonesia | PT Lehmann Technology Asia | PT M+R Forwarding Indonesia

PT Mercuria Energy Services | PT Metrohm Indonesia | PT MSC Indonesia

PT Oerlikon Balzers Artoda Indonesia | PT Omya Indonesia | PT. Primatek Technologies

PT Rhenus Project Logistics Indonesia | Ricola Asia Pacific Pte Ltd (Singapore) | PT Sandmaster Asia

PT Santoso Teknindo | Swiss International Airlines Ltd / Lufthansa | Swisscontact

PT Swiss Indonesia Management | Swissôtel Jakarta PIK Avenue | PT Tunas Tasik

PT Syngenta Indonesia | PT United Chemicals Inter Aneka | PT ZI-Techasia (a member of Zuellig Industrial)

Tersedia format digital Policy Paper SwissCham
Indonesia yang bisa diunduh melalui

<https://swisscham.id/>

SWISSCHAM INDONESIA POLICY PAPER **ADVANCING INDONESIA 4.0**

Tersedia dalam format digital, bahasa Inggris dan Indonesia



SwissCham Indonesia

Mayapada Tower II, 3rd floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920

- ✉ secretariat@swisscham.id
- ☎ 62 21 250 0550
- 📘 [SwissChamIndonesia](#)
- 🐦 [@SwissChamID](#)
- 📘 [company/swisscham-indonesia](#)
- 📷 [@swisscham.id](#)